

LAPORAN KINERJA TRIWULANAN KEPALA PERANGKAT DAERAH

LAPORAN KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2025
Plt. KEPALA BADAN KESBANGPOL KOTA PEKALONGAN




BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA PEKALONGAN
TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia Nya maka Laporan Kinerja (LKj) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekalongan Triwulan II Tahun 2025 dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat umumnya dan Pegawai Negeri Sipil pada khususnya bahwa “Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik” mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa *output* maupun *outcomes*.

Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan capaian kinerja secara berkala dalam pelaksanaan tugas pokok fungsi dan kewenangan di dalam pengelolaan manajemen kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja. Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektifitas dan efisiensi kinerja “Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik” melalui pelaksanaan kegiatan dengan mendasarkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang telah ditetapkan.

Pekalongan, 1 Juli 2025
Plt. Kepala Badan Kesbangpol
Kota Pekalongan


M.TAUFIQ ROCHMAN, S.STP.,MM
NIP. 19780107 199703 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	I
BAB I PENDAHULUAN	1
A Tugas Jabatan	1
B Struktur Jabatan	2
BAB II AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN	3
A Perjanjian Kinerja	3
B Capaian Kinerja	4
C Capaian Anggaran	6
BAB I PENUTUP	8
A Kesimpulan	8
B Rekomendasi	8

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Perjanjian Kinerja Kepala Tahun 2025	3
Tabel 2.2.	Pengukuran dengan Skala Ordinal	4
Tabel 2.3.	Pengukuran Kinerja Kepala TRIWULAN II Tahun 2025	5
Tabel 2.4.	Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Tahun Anggaran 2025.....	6

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Struktur Organisasi	2
---------------------------------------	---

BAB I

PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 96 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekalongan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekalongan mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

Dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menyelenggarakan fungsi:

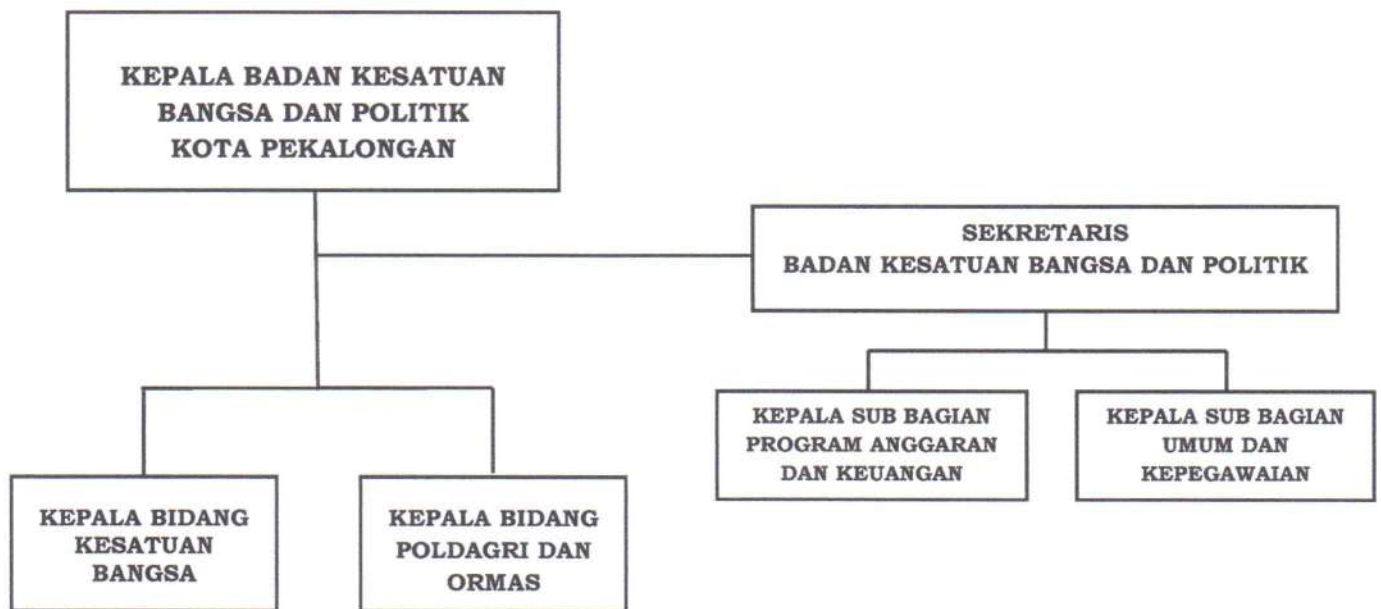
1. Perumusan dan penetapan sasaran serta program bidang kesatuan bangsa dan politik;
2. Perumusan kebijakan bidang kesatuan bangsa dan politik;
3. Pengoordinasian penyelenggaraan penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan;
4. Pengoordinasian penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya;
5. Pengoordinasian penyelenggaraan peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial;
6. Pengoordinasian penyelenggaraan peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik;
7. Pengoordinasian penyelenggaraan pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan;
8. Penyelenggaraan fasilitasi forum koordinasi pimpinan Daerah;
9. Pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang kesekretariatan;
10. pengarahan dan pengoordinasian pelaksanaan dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/atau Standar Pelayanan (SP);
11. pengoordinasian pengendalian, pengawasan, pembinaan, pengevaluasian,
12. dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan pelaksanaan tugas; dan;

13. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. Struktur Jabatan

Struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, sebagaimana gambar 1.1 dibawah ini :

Gambar 1.1 Struktur Organisasi



BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Adapun perjanjian kinerja kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Tahun 2025

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Keterangan
Tujuan :				
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	81,50	Formulasi : IKM Tahun N Tipe Capaian : Semakin Tinggi Semakin Baik Sumber data : Bagian Organisasi
2	Meningkatkan pengelolaan potensi konflik sosial	Persentase pengelolaan potensi konflik sosial	100%	Formulasi : Jumlah pengelolaan potensi konflik sosial dibagi jumlah potensi konflik sosial kali 100% Tipe Capaian : Semakin Tinggi Semakin Baik Sumber data : Bakesbangpol
Sasaran :				
1	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	73,70	Formulasi : Hasil Nilai Evaluasi AKIP OPD Tahun N Tipe Capaian : Semakin Tinggi Semakin Baik Sumber data : Inspektorat

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Keterangan
2	Meningkatkan etnis /suku/ agama/ ormas dan LSM yang paham terhadap nilai - nilai kehidupan berbangsa	Persentase etnis/ suku/ agama/ ormas dan LSM yang memahami nilai-nilai kehidupan berbangsa	100%	Formulasi : Jumlah etnis/suku/agama/ormas dan LSM yang memahami nilai-nilai kehidupan berbangsa dibagi jumlah penduduk kota pekalongan usia 13-60 tahun kali 100% Tipe Capaian : Semakin Tinggi Semakin Baik Sumber data : Bakesbangpol
3	Meningkatkan pemahaman partai politik dan Lembaga Pendidikan terhadap tata kehidupan politik	Persentase partai politik dan Lembaga Pendidikan yang memahami tata kehidupan politik	100%	Formulasi : Jumlah partai politik dan lembaga pendidikan yang memahami tata kehidupan politik dibagi jumlah partai politik dan lembaga pendidikan Tipe Capaian : Semakin tinggi semakin baik Sumber data : Bakesbangpol

B. Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi indikator kinerja kegiatan.

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja dengan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, dengan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Target}}{\text{Realisasi}} \times 100\%$$

3. Rumus Efisiensi

Rumus efisiensi penggunaan sumber daya sebagai berikut

$$\text{Efisiensi} = \left(\frac{\text{capaian kinerja}}{\text{capaian anggaran}} \right) - 1 \times 100$$

CAPAIAN

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran sesuai Permendagri No. 54 Tahun 2010, menggunakan interpretasi penilaian dengan pengukuran dengan skala ordinal yaitu:

Tabel 2.2
Pengukuran dengan Skala Ordinal

Skala Ordinal	Predikat / Kategori
90.1 s.d. lebih	Sangat Tinggi / Sangat Berhasil
75.1 s.d. 90	Tinggi / Berhasil
65.1 s.d. 75	Sedang / Cukup Berhasil
50.1 s.d. 65	Rendah / Tidak Berhasil
0 s.d. 50	Sangat Rendah / Sangat Tidak Berhasil

Adapun capaian kinerja Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Triwulan II Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3
Pengukuran Kinerja Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Triwulan II Tahun 2025

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target s/d Triwulan II	Realisasi s/d Triwulan II	% Capaian
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	81,50	-	82,84	101,64
2	Meningkatkan pengelolaan potensi konflik sosial	Persentase pengelolaan potensi konflik sosial	100%	100%	100%	100
3	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	73,70	-	-	100
4	Meningkatkan etnis /suku/ agama/ ormas dan LSM yang paham terhadap nilai - nilai kehidupan berbangsa	Persentase etnis/ suku/ agama/ ormas dan LSM yang memahami nilai- nilai kehidupan berbangsa	100%	58,88%	58,88	100
5	Meningkatkan pemahaman partai politik dan Lembaga Pendidikan terhadap tata kehidupan politik	Persentase partai politik dan Lembaga Pendidikan yang memahami tata kehidupan politik	100%	100%	100%	100
Rata-rata Capaian						100,33

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah sebesar 100 % dengan kategori Sangat Tinggi.

Adapun tercapainya capaian kinerja tersebut tidak lepas dari beberapa faktor, antara lain :

Faktor Pendukung	Faktor Penghambat
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kerjasama dan hubungan yang baik antar pegawai Badan Kesbangpol Kota Pekalongan dan juga dengan instansi terkait, Partai Politik, LSM dan Organisasi Kemasyarakatan yang ada. 2. Kerjasama yang baik dan peningkatan kinerja seluruh pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekalongan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Majemuknya Masyarakat Kota Pekalongan dan adanya dinamika permasalahan di Masyarakat Kota Pekalongan. 2. SDM dan Sarana Prasarana yang masih sangat kurang.

C. Capaian Anggaran

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi telah didukung dengan program dan kegiatan dalam APBD. Adapun realisasi anggaran program dan kegiatan sebagai berikut :

Tabel. 2.4

Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Tahun Anggaran 2025

No	Program	Pagu Anggaran Tahunan (Rp)	Target s.d TRIWULAN II (Rp)	Realisasi s.d TRIWULAN II (Rp)	% Capaian $\frac{(5)}{(4)} * 100$
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Program penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	2.006.743.000	701.097.400	493.310.496	70,36
2	Program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	1.717.090.000	1.641.000.200	1.450.285.566	88,38

No	Program	Pagu Anggaran Tahunan (Rp)	Target s.d TRIWULAN II (Rp)	Realisasi s.d TRIWULAN II (Rp)	% Capaian $\{(5)/(4) * 100\}$
3	Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	440.900.000	417.092.000	311.185.000	74,61
4	Program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya	97.837.000	33.911.400	34.592.100	102,01
5	Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitas penanganan konflik sosial	288.930.000	146.216.600	141.764.600	96,96
6	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota	3.445.796.000	1.612.708.629	1.110.412.984	68,85
	Jumlah	7.997.296.000	4.552.026.229	3.541.550.746	77,80

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata realisasi anggaran sampai dengan Triwulan II adalah sebesar 77,80%.

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja dan capaian anggaran diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian kinerja sebesar 100,33%, sedangkan realisasi anggaran sebesar 77,80%, maka terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 22,53%

BAB I

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja dan capaian anggaran diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian kinerja sebesar 100,33%, sedangkan realisasi anggaran sebesar 77,80%, maka terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 22,53%.

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka yang dapat direkomendasikan untuk perbaikan perencanaan kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Triwulan III Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Penambahan penyediaan sarana dan pra sarana penunjang kinerja
2. Peningkatan SDM secara kuantitatif dan kualitatif
3. Peningkatan kedisiplinan dalam pelaksanaan kegiatan

Pekalongan, 1 Juli 2025

Mengetahui

WALIKOTA,



ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID, SE

Plt. Kepala Badan Kesbangpol Kota Pekalongan

M.TAUFIQU ROCHMAN, S.STP.,MM
NIP. 19780107 199703 1 002

LAPORAN KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2025
SEKRETARIS BADAN KESBANGPOL
KOTA PEKALONGAN



BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA PEKALONGAN
TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia Nya maka Laporan Kinerja (LKj) “Sekretaris Badan Kesbangpol Kota Pekalongan” Triwulan II Tahun 2025 dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat umumnya dan Pegawai Negeri Sipil pada khususnya bahwa “Sekretaris Badan Kesbangpol Kota Pekalongan” mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa *output* maupun *outcomes*.

Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan capaian kinerja secara berkala dalam pelaksanaan tugas pokok fungsi dan kewenangan di dalam pengelolaan manajemen kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja. Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektifitas dan efisiensi kinerja “Sekretaris Badan Kesbangpol Kota Pekalongan” melalui pelaksanaan kegiatan dengan mendasarkan pada Perjanjian Kinerja dan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 yang telah ditetapkan.

Pekalongan, 1 Juli 2025

Sekretaris Badan Kesbangpol Kota Pekalongan



M. TAUFIQ ROCHMAN, S.STP., MM

NIP. 19780107 199703 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A Tugas Pokok dan Fungsi jabatan.....	1
B Struktur Jabatan	3
BAB II AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN	5
A Perjanjian Kinerja	5
B Capaian Kinerja	6
C Capaian Anggaran	8
BAB III PENUTUP	10
A Kesimpulan	10
B Rekomendasi	10

BAB I

PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 96 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekalongan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekalongan mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

Sekretaris Badan Kesbangpol Kota Pekalongan mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, barang milik daerah, dan keuangan, serta pengoordinasian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah

Sekretaris Badan Kesbangpol Kota Pekalongan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan sasaran, program, dan kegiatan badan;
- b. Pengoordinasian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja, sasaran, program, dan kegiatan;
- c. Pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan;
- d. Pembinaan pengelolaan administrasi keuangan perangkat daerah;
- e. Pembinaan pengelolaan administrasi umum perangkat daerah;
- f. Pembinaan pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah;
- g. Pembinaan pengelolaan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah;
- h. Pengoordinasian pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah;
- i. Pengoordinasian penyediaan jasa penunjang;
- j. Pengoordinasian pengelolaan data dan informasi;
- k. Pengoordinasian penyusunan, pelaksanaan, dan pengevaluasian Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/atau Standar Pelayanan (SP);
- l. Pengoordinasian pelaporan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Evaluasi Jabatan, dan Evaluasi Kelembagaan;
- m. Pengendalian, pembinaan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
- n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

B. Struktur Jabatan

Struktur organisasi jabatan Sekretaris Badan Kesbangpol Kota Pekalongan, sebagaimana gambar 1.1 dibawah ini :

Gambar 1.1 Struktur Organisasi



BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Adapun perjanjian kinerja Sekretaris Badan Kesbangpol Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Perubahan Sekretaris Badan Kesbangpol Kota Pekalongan
Tahun 2025

No	Sasaran Strategis dan Program	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Keterangan
1	Meningkatnya ketersediaan laporan capaian kinerja	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100%	Formulasi : Persentase capaian kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tahun N + Persentase capaian kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tahun N dibagi 2 Tipe capaian : Semakin tinggi semakin baik
2	Meningkatnya ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	Formulasi : Persentase capaian kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Tahun N + Persentase capaian kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Tahun N + Persentase capaian kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tahun N dibagi 3 Tipe capaian : Semakin tinggi semakin baik
3	Meningkatnya pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	100%	Formulasi : Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah Persentase capaian kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tahun N + Persentase capaian kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tahun N dibagi 2 Tipe capaian : Semakin tinggi semakin baik

B. Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja Sekretaris Badan Kesbangpol Triwulan II Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi indikator kinerja kegiatan.

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja dengan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Target}}{\text{Realisasi}} \times 100\%$$

3. Rumus Efisiensi

Rumus efisiensi penggunaan sumber daya sebagai berikut :

$$\text{Efisiensi} = \left(\frac{\text{capaian kinerja}}{\text{capaian anggaran}} \right) - 1 \times 100$$

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran sesuai Permendagri No. 54 Tahun 2010, menggunakan interpretasi penilaian dengan pengukuran dengan skala ordinal yaitu:

Tabel 2.2

Pengukuran dengan Skala Ordinal

Skala Ordinal	Predikat / Kategori
90.1 s.d. lebih	Sangat Tinggi / Sangat Berhasil
75.1 s.d. 90	Tinggi / Berhasil
65.1 s.d. 75	Sedang / Cukup Berhasil
50.1 s.d. 65	Rendah / Tidak Berhasil
0 s.d. 50	Sangat Rendah / Sangat Tidak Berhasil

Adapun capaian kinerja Sekretaris Badan Kesbangpol Triwulan II Tahun 2025 sebagaimana tabel 2.3 dibawah ini :

Tabel 2.3
Pengukuran Kinerja Sekretaris Badan Kesbangpol Kota Pekalongan
Triwulan II Tahun 2025

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target s/d Triwulan II	Realisasi s/d Triwulan II	% Capaian
1	Meningkatnya ketersediaan laporan capaian kinerja	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100%	57,67%	57,67%	100
2	Meningkatnya ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	30,71%	30,71%	100
3	Meningkatnya pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	100%	40,79%	40,79%	100
Rata-rata Capaian						100

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja “ Sekretaris Badan Kesbangpol” adalah sebesar 100 % dengan kategori “sangat tinggi/sangat berhasil”. Faktor Pendukung keberhasilan capaian kinerja pada Triwulan II ini adalah sebagai berikut :

- 1.) Dukungan, bimbingan dan arahan dari Asisten I Setda Kota Pekalongan dan Sekretaris Daerah Kota Pekalongan.
- 2.) Kerjasama yang baik dan sinergitas seluruh Karyawan / wati Badan Kesbangpol Kota Pekalongan.
- 3.) Semangat dan etos kerja yang tinggi dalam usaha untuk mencapai target kinerja yang sudah ditetapkan.
- 4.) Pemanfaatan yang optimal dari peralatan dan perlengkapan kantor yang sudah ada, walaupun kondisinya terbatas dan sudah tidak berfungsi baik.

C. Capaian Anggaran

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi telah didukung dengan program dan kegiatan dalam APBD. Adapun realisasi anggaran program dan kegiatan sebagai berikut :

Tabel. 2.4

Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Tahun Anggaran 2025

No	Program	Pagu Anggaran Tahunan (Rp)	Target s/d Triwulan II (Rp)	Realisasi s/d Triwulan II (Rp)	% Capaian $\{(5)/(4)*100\}$
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.445.796.000	1.612.708.629	1.110.412.984	68,85
Rata-rata Capaian					68,85

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata realisasi anggaran pada Triwulan II adalah sebesar 68,85%.

Berdasarkan tabel diatas persentase realisasi penggunaan anggaran adalah sebesar 68,85%. Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja indikator kinerja Triwulan II sebesar 100%, maka terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 31,15 %.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja dan capaian anggaran diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian kinerja sebesar 100% , sedangkan realisasi anggaran sebesar 68,85 %, maka terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 31,15 %.

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka yang dapat direkomendasikan untuk perbaikan perencanaan kinerja dalam pelaksanaan kegiatan Sekretaris Badan Kesbangpol Kota Pekalongan Triwulan II Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Mempertahankan kinerja dan meningkatkan kembali agar dapat semakin baik dan optimal.
2. Bekerjasama dengan PPTK dan Kasir Kegiatan untuk lebih mengoptimalkan kembali kinerja dan target kinerja.

Pekalongan, 1 Juli 2025

Mengetahui
Sekretaris Daerah Kota Pekalongan



NUR PRIYANTOMO, S.E., M.M.
NIP. 19690310 199603 1 002

Sekretaris Badan Kesbangpol
Kota Pekalongan

M.TAUFIQ ROCHMAN, S.STP.,MM
NIP. 19780107 199703 1 002

LAPORAN KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2025
KEPALA BIDANG KESATUAN BANGSA



BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA PEKALONGAN
TAHUN 2025


KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia Nya maka Laporan Kinerja (LKj) Kepala Bidang Kesatuan Bangsa Triwulan II Tahun 2025 dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat umumnya dan Pegawai Negeri Sipil pada khususnya bahwa Kepala Bidang Kesatuan Bangsa mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa *output* maupun *outcomes*.

Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan capaian kinerja secara berkala dalam pelaksanaan tugas pokok fungsi dan kewenangan di dalam pengelolaan manajemen kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja. Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja Kepala Bidang Kesatuan Bangsa melalui pelaksanaan kegiatan dengan mendasarkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang telah ditetapkan.

Pekalongan, 01 Juli 2025

Kepala Bidang Kesatuan Bangsa
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Pekalongan


NUR SLAMET B. S.Pi, M.Si
Pembina
NIP. 19721201 199903 1 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	li
DAFTAR TABEL	lii
DAFTAR GAMBAR	lii
BAB I PENDAHULUAN	1
A Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan	1
B Struktur Jabatan	1
BAB II AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN	3
A Perjanjian Kinerja	3
B Capaian Kinerja	3
C Capaian Anggaran	4
BAB III PENUTUP	5
A Kesimpulan	5
B Rekomendasi	5

BAB I

PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 96 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kepala Bidang Kesatuan Bangsa mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaanm bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar daerah, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik.

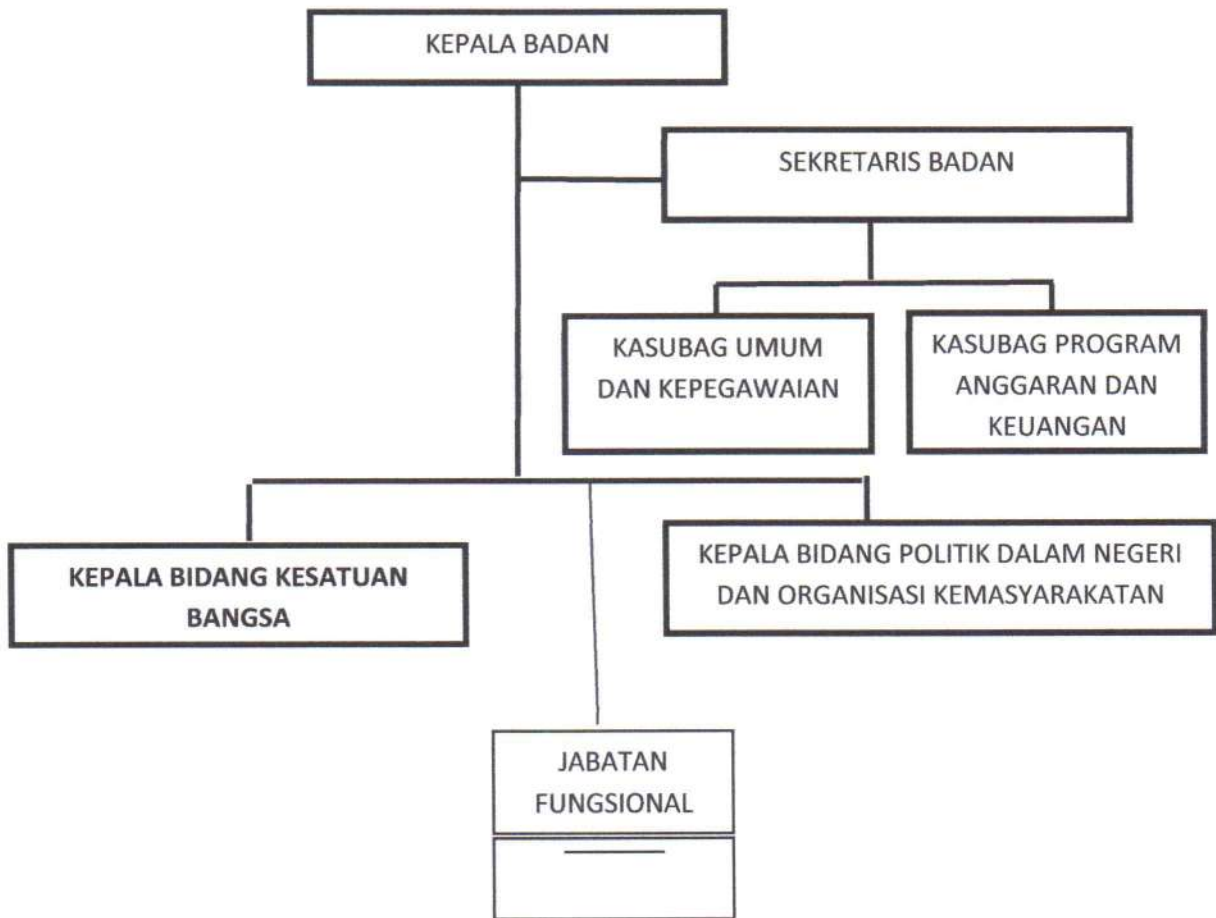
Dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut, Kepala Bidang Kesatuan Bangsa menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan program kerja di bidang kesatuan bangsa.
2. Perumusan bahan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa.
3. Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan.
4. Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya.
5. Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial.
6. Pengendalian, pembinaan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

B. Struktur Jabatan

Struktur organisasi jabatan Kepala Bidang Kesatuan Bangsa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekalongan sebagaimana gambar 1.1 dibawah ini :

Gambar 1.1 Struktur Organisasi



Sumber: Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 96 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Adapun perjanjian kinerja Kepala Bidang Kesatuan Bangsa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekalongan Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Kesatuan Bangsa Kota Pekalongan
Tahun 2025

No	Sasaran Kegiatan	Aspek	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)		(3)	(4)
1	Meningkatnya etnis/suku/agama/ormas dan LSM yang paham terhadap ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan	Kuantitas	persentase etnis / suku/agama/ormas dan LSM yang paham terhadap ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan	100 persen
		Waktu	Jumlah bulan pelaksanaan Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	12 bulan
2	Meningkatnya pembinaan karakter penguatan wawasan kebangsaan, pelaksanaan upacara bendera dan korp music	Kuantitas	Persentase pembinaan karakter penguatan wawasan kebangsaan, pelaksanaan upacara bendera dan korp music	100 persen
		Waktu	Jumlah Bulan Pelaksanaan Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	12 bulan
		Biaya	Junlah Anggaran Pelaksanaan Kegiatan	Rp. 1.964.808.000
3.	Meningkatnya etnis .suku. agama/ormas dan LSM yang memahami tentang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	Kuantitas	Persentase etnis.suku.agama/ormas dan LSM yang memahami tentang ketahanan ekonomi, social dan budaya	100 persen
		Waktu	Jumlah Bulan pelaksanaan Program Penbinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi. Sosial dan Budaya	12 bulan

No	Sasaran Kegiatan	Aspek	Indikator Kinerja	Target
4.	Meningkatnya pelaksanaan kegiatan perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	Kuantitas	Persentase pelaksanaan kegiatan perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	100 persen
		Waktu	Jumlah Bulan Pelaksanaan Kegiatan perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	12 bulan
		Biaya	Jumlah Anggaran Pelaksanaan Kegiatan perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	Rp. 91.962.000
5.	Meningkatnya penanganan kejadian terkait konflik sosial	Kuantitas	Persentase Penanganan kejadian terkait konflik sosial	100 persen
		Waktu	Jumlah Bulan Pelaksanaan Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	12 bulan
6.	Meningkatnya pelaksanaan kegiatan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial	Kuantitas	Persentase pelaksanaan kegiatan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial	100 persen
		Waktu	Jumlah Bulan pelaksanaan kegiatan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial	12 bulan
		Biaya	Jumlah Anggaran Pelaksanaan kegiatan pelaksanaan kegiatan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial	Rp. 265.130.000

B. Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja Kepala Bidang Kesatuan Bangsa Triwulan II Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi indikator kinerja kegiatan.

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja dengan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Target}}{\text{Realisasi}} \times 100\%$$

3. Rumus Efisiensi

Rumus efisiensi penggunaan sumber daya sebagai berikut :

$$\text{Efisiensi} = \left(\frac{\text{capaian kinerja}}{\text{capaian anggaran}} \right) - 1 \times 100$$

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran sesuai Permendagri No. 54 Tahun 2010, menggunakan interpretasi penilaian dengan pengukuran dengan skala ordinal yaitu:

Tabel 2.2

Pengukuran dengan Skala Ordinal

Skala Ordinal	Predikat / Kategori
90.1 s.d. lebih	Sangat Tinggi / Sangat Berhasil
75.1 s.d. 90	Tinggi / Berhasil
65.1 s.d. 75	Sedang / Cukup Berhasil
50.1 s.d. 65	Rendah / Tidak Berhasil
0 s.d. 50	Sangat Rendah / Sangat Tidak Berhasil

Adapun capaian kinerja Kepala Bidang Kesatuan Bangsa Triwulan II Tahun 2025 sebagaimana tabel 2.2 dibawah ini :

Tabel 2.3

Pengukuran Kinerja Kepala Bidang Kesatuan Bangsa
Triwulan II Tahun 2025

No	Sasaran Kegiatan	Aspek	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target s.d Triwulan II	Realisasi s.d Triwulan II	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya etnis/suku /agama/ormas dan LSM yang paham terhadap ideologi pancasila dan wawasan	Kuantitas	persentase etnis / suku /agama/ormas dan LSM yang paham terhadap ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan	100 persen	26,54%	23,93	90,17

No	Sasaran Kegiatan	Aspek	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target s.d Triwulan II	Realisasi s.d Triwulan II	% Capaian
	kebangsaan						
		Waktu	Jumlah bulan pelaksanaan Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	12 bulan	3 bulan	3 bulan	100
2	Meningkatnya pembinaan karakter penguatan wawasan kebangsaan, pelaksanaan upacara bendera dan korp musik	Kuantitas	Persentase pembinaan karakter penguatan wawasan kebangsaan, pelaksanaan upacara bendera dan korp music	100 persen	26,54%	23,93	90,17
		Waktu	Jumlah Bulan Pelaksanaan Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	12 bulan	3 bulan	3 bulan	100
		Biaya	Jumlah Anggaran Pelaksanaan Kegiatan	Rp 1.964.808.000	Rp 521.530.170	Rp 470.233.110	90,17
3.	Meningkatnya etnis .suku. agama/ormas dan LSM yang memahami tentang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	Kuantitas	Persentase etnis.suku.agama / ormas dan LSM yang memahami tentang ketahanan ekonomi, social dan budaya	100 persen	38,91%	36,45	100
		Waktu	Jumlah Bulan pelaksanaan Program Penbinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi. Sosial dan Budaya	12 bulan	3 bulan	3 bulan	100
4.	Meningkatnya pelaksanaan kegiatan perumusan kebijakan	Kuantitas	Persentase pelaksanaan kegiatan perumusan kebijakan teknis	100 persen	38,91%	36,45	93,67

No	Sasaran Kegiatan	Aspek	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target s.d Triwulan II	Realisasi s.d Triwulan II	% Capaian
	teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya		dan pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya				
		Waktu	Jumlah Bulan Pelaksanaan Kegiatan perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	12 bulan	3 bulan	3 bulan	100
		Biaya	Jumlah Anggaran Pelaksanaan Kegiatan perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	Rp. 91.962.000	Rp. 35.783.810	Rp. 33.525.000	93,67
5.	Meningkatnya penanganan kejadian terkait konflik sosial	Kuantitas	Persentase Penanganan kejadian terkait konflik sosial	100 persen	56,26%	51,90%	92,25
		Waktu	Jumlah Bulan Pelaksanaan Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	12 bulan	3 bulan	3 bulan	100
6.	Meningkatnya pelaksanaan kegiatan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan	Kuantitas	Persentase pelaksanaan kegiatan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial	100 persen	56,26%	51,90%	92,25

No	Sasaran Kegiatan	Aspek	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target s.d Triwulan II	Realisasi s.d Triwulan II	% Capaian
	konflik sosial						
		Waktu	Jumlah Bulan pelaksanaan kegiatan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial	12 bulan	3 bulan	3 bulan	100
		Biaya	Jumlah Anggaran Pelaksanaan kegiatan pelaksanaan kegiatan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial	Rp. 265.130.000	Rp 149.179.000	Rp. 137.620.600	92,25
	Rata - Rata						95,21

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja Kepala Bidang Kesatuan Bangsa adalah sebesar 95,21 % dengan kategori Sangat Berhasil

Upaya yang dilakukan guna mendukung capaian kinerja pada Triwulan selanjutnya adalah sebagai berikut:

1. Optimalisasi pelaksanaan tiap pekerjaan di Triwulan III Tahun 2025
2. Koordinasi lebih intensif ke stake holder terkait

C. Capaian Anggaran

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi telah didukung dengan program dan kegiatan dalam APBD. Adapun realisasi anggaran program dan kegiatan sebagai berikut :

Tabel. 2.4

Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Tahun Anggaran 2025

No	Kegiatan	Pagu Anggaran Tahunan (Rp)	Target s.d Triwulan II (Rp)	Realisasi s.d Triwulan II (Rp)	% Capaian $\{(5)/(4)*100\}$
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Perumusan kebijakan teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan karakter Kebangsaan	1.964.808.000	521.530.170	470.233.110	90,16
2	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	91.962.000	35.783.810	33.525.000	93,68
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	265.130.000	149.179.000	137.620.600	92,25
Rata-rata Capaian					92,03

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata realisasi anggaran pada triwulan II adalah sebesar 92,03%.

Berdasarkan tabel diatas persentase realisasi penggunaan anggaran adalah sebesar 92,03%. Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja indikator kinerja Triwulan II sebesar 95,21%, maka terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 3,45.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja dan capaian anggaran diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian kinerja sebesar 95,21%, sedangkan realisasi anggaran sebesar 92,03 %, maka terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 3,45.

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka yang dapat direkomendasikan untuk perbaikan perencanaan kinerja dalam pelaksanaan kegiatan Kepala Bidang Kesatuan Bangsa Triwulan III Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Rakor Pengendalian operasional kegiatan dilaksanakan sebelum akhir triwulan.
2. Komitmen dari PPTK dan Kasir untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan target yang telah ditetapkan
3. Optimalisasi pelaksanaan tiap pekerjaan di Triwulan III Tahun 2025
4. Koordinasi lebih intensif ke stake holder terkait

Pekalongan, 01 Juli 2025

Mengetahui

**Plt. Kepala Badan Kesbangpol
Kota Pekalongan**



M. TAUFIQU ROCHMAN, S.STP, MM
NIP. 19780107 199703 1 002

**Kepala Bidang Kesatuan Bangsa
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Pekalongan**

NUR SLAMET B, SPL, MSi
NIP. 19721201 199903 1 005

LAPORAN KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2025
KEPALA BIDANG POLITIK DALAM NEGERI
DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN



BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA PEKALONGAN
TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia Nya maka Laporan Kinerja (LKj) Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan Triwulan II Tahun 2025 dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat umumnya dan Pegawai Negeri Sipil pada khususnya bahwa Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa *output* maupun *outcomes*.

Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan capaian kinerja secara berkala dalam pelaksanaan tugas pokok fungsi dan kewenangan di dalam pengelolaan manajemen kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja. Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan melalui pelaksanaan tugas dengan mendasarkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang telah ditetapkan.

Pekalongan, 1 Juli 2025

Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan
Organisasi Kemasyarakatan



NUGROHO ADHI PRADHANA, SE.MSi

Pembina

NIP. 197408051999031005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
.....	
DAFTAR ISI	Ii
.....	
DAFTAR TABEL	Iii
.....	
DAFTAR GAMBAR	Iii
.....	
BAB I PENDAHULUAN	1
.....	
A Tugas Jabatan	1
.....	
B Struktur Jabatan	1
.....	
BAB II AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN	2
.....	
A Perjanjian Kinerja	2
.....	
B Capaian Kinerja	2
.....	
BAB III PENUTUP	5
.....	
A Kesimpulan	5
.....	
.....	
B Rekomendasi	5
.....	
.....	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 96 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekalongan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekalongan mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

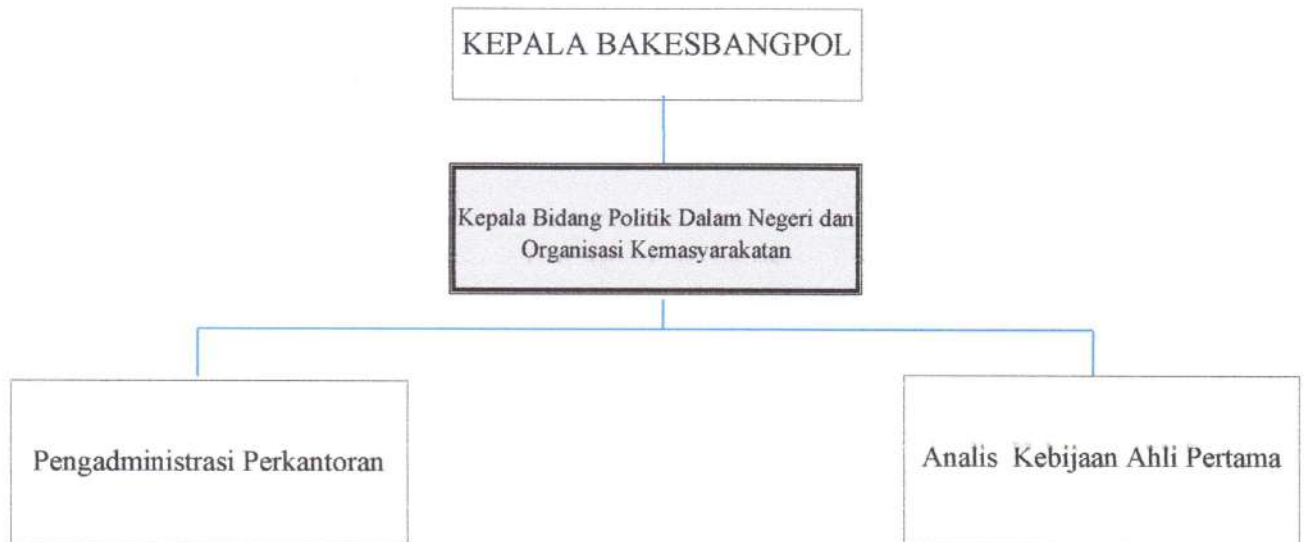
Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai uraian tugas jabatan adalah sebagai berikut :

1. perumusan program kerja di bidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan
2. perumusan bahan kebijakan teknis di bidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan;
3. perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik;
4. perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan;
5. pengoordinasian fasilitasi forum koordinasi pimpinan Daerah;
6. pengendalian, pembinaan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya

B. Struktur Jabatan

Struktur organisasi jabatan Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan, sebagaimana gambar 1.1 dibawah ini :

Gambar 1.1 Struktur Organisasi



BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Adapun perjanjian kinerja Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan Tahun 2025

No	Sasaran Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya koordinasi di bidang pendidikan politik	Jumlah Parpol dan lembaga pendidikan yang mengikuti pendidikan politik	16 lembaga
2	Meningkatnya ormas yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan	Persentase ormas yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan	100 persen
3	Meningkatnya pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan politik	Persentase pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan politik	100 persen
4	Meningkatnya pelaksanaan kegiatan perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	Persentase pelaksanaan kegiatan perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	100 persen
5	Tercapainya Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	600 Orang

No	Sasaran Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
6	Tercapainya Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	630 Orang
7	Tercapainya Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	300 Orang

B. Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan Triwulan II Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi indikator kinerja kegiatan.

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Target}}{\text{Realisasi}} \times 100\%$$

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran sesuai Permendagri No. 54 Tahun 2010, menggunakan interpretasi penilaian dengan pengukuran dengan skala ordinal yaitu:

Tabel 2.2

Pengukuran dengan Skala Ordinal

Skala Ordinal	Predikat / Kategori
90.1 s.d. lebih	Sangat Tinggi / Sangat Berhasil
75.1 s.d. 90	Tinggi / Berhasil
65.1 s.d. 75	Sedang / Cukup Berhasil
50.1 s.d. 65	Rendah / Tidak Berhasil
0 s.d. 50	Sangat Rendah / Sangat Tidak Berhasil

Adapun capaian kinerja Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan Triwulan II Tahun 2025 sebagaimana tabel 2.3 dibawah ini

Tabel 2.3

Pengukuran Kinerja Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan
Triwulan II Tahun 2025

No	Sasaran Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target s/d TW II	Realisasi s/d TW II	% Capaian
1	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Jumlah Parpol dan lembaga pendidikan yang mengikuti pendidikan politik	16 lembaga	10 lembaga	10 lembaga	100
2	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase ormas yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan	100 persen	0 persen	0 persen	100
3	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan Politik	100 persen	13,33 persen	13,33 persen	100
4	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang	Persentase pelaksanaan kegiatan	100 persen	7,33 persen	7,33 persen	100

No	Sasaran Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target s/d TW II	Realisasi s/d TW II	% Capaian
	Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan				
5	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah orang yang mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	600 Orang	450 orang	450 orang	100
6	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang mengikuti koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di	630 Orang	300 orang	300 orang	100

No	Sasaran Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target s/d TW II	Realisasi s/d TW II	% Capaian
		Daerah				
7	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	300 Orang	22 orang	22 orang	100
<i>Rata-rata Capaian</i>						100%

Faktor Penghambat capaian kinerja pada Triwulan II ini adalah sebagai berikut:

1. Pada Triwulan II kegiatan dikpol masih ada perubahan pelaksanaan kegiatan
2. Jadwal yang belum sesuai dengan yang di rencanakan

Upaya yang dilakukan guna mendukung capaian kinerja pada Triwulan II selanjutnya adalah sebagai berikut :

1. Memprioritaskan kegiatan yang mendesak untuk segera dilaksanakan
2. Mempersiapkan kelengkapan administrasi sebelum kegiatan di laksanakan
3. Monitoring kesiapan sebelum kegiatan di laksanakan

C. Capaian Anggaran

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi telah didukung dengan program dan kegiatan dalam APBD. Adapun realisasi anggaran program dan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2.4
Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung
Tahun Anggaran 2025

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Tahunan (Rp)	Target Triwulan II (Rp)	Realisasi s/d Triwulan II (Rp)	%Capaian $\{(5)/(4) * 100\}$
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	1,717,090,000	853.891.234	1.484.410.566	100
2	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	440,900,000	308.965.000	311.185.000	100
3	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	1,717,090,000	853.891.234	1.484.410.566	100
4	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	440,900,000	308.965.000	311.185.000	100
5	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	1,402,980,000	813.173.000	1.388.173.000	100
6	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	314,110,000	6.593.234	62.112.566	100
7	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	440,900,000	308.965.000	311.185.000	100
Rata rata					100

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata realisasi anggaran pada triwulan II adalah sebesar 100 %.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran kegiatan diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian kinerja Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan adalah sebesar 100 % dengan kategori “sangat tinggi”

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka yang dapat direkomendasikan untuk perbaikan perencanaan kinerja Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan Triwulan II Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Mempersiapkan kegiatan yang belum di laksanakan
2. Memprioritaskan program kegiatan yang dapat di laksanakan di triwulan II
3. Berkoordinasi dengan pihak pihak terkait untuk kelancaran kegiatan.

Pekalongan, 1 Juli 2025

Mengetahui

Plt. KEPALA BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK KOTA
PEKALONGAN

KEPALA BIDANG POLITIK DALAM
NEGERI DAN ORGANISASI
KEMASYARAKATAN



M. TAUFIQ ROCHMAN, SSTP.MM
NIP. 19780107 1997 1002

NUGROHO ADHI PRADHANA, SE.MSi
NIP. 19748051999031005

LAPORAN KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2025
KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM ANGGARAN DAN KEUANGAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA PEKALONGAN



BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA PEKALONGAN
TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia Nya maka Laporan Kinerja (LKj) Kepala Sub Bagian Program Anggaran dan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekalongan Triwulan II Tahun 2025 dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat umumnya dan Pegawai Negeri Sipil pada khususnya bahwa Kepala Sub Bagian Program Anggaran dan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekalongan mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa *output* maupun *outcomes*.

Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan capaian kinerja secara berkala dalam pelaksanaan tugas pokok fungsi dan kewenangan di dalam pengelolaan manajemen kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja. Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektifitas dan efisiensi kinerja Kepala Sub Bagian Program Anggaran dan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekalongan melalui pelaksanaan kegiatan dengan mendasarkan pada Perjanjian Kinerja dan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 yang telah ditetapkan.

Pekalongan, Juli 2025

Kepala Sub Bagian Program Anggaran dan Keuangan
Badan Kesbangpol Kota Pekalongan


Iman Widiharjo, A.Md
Penata Tk.I
NIP. 19810909 200604 1 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A Tugas Jabatan	1
B Struktur Jabatan	1
BAB II AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN	3
A Perjanjian Kinerja	3
B Capaian Kinerja	4
C Kinerja Keuangan	6
BAB I PENUTUP	7
A Kesimpulan	8
B Rekomendasi	8

BAB I

PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 96 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekalongan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekalongan mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

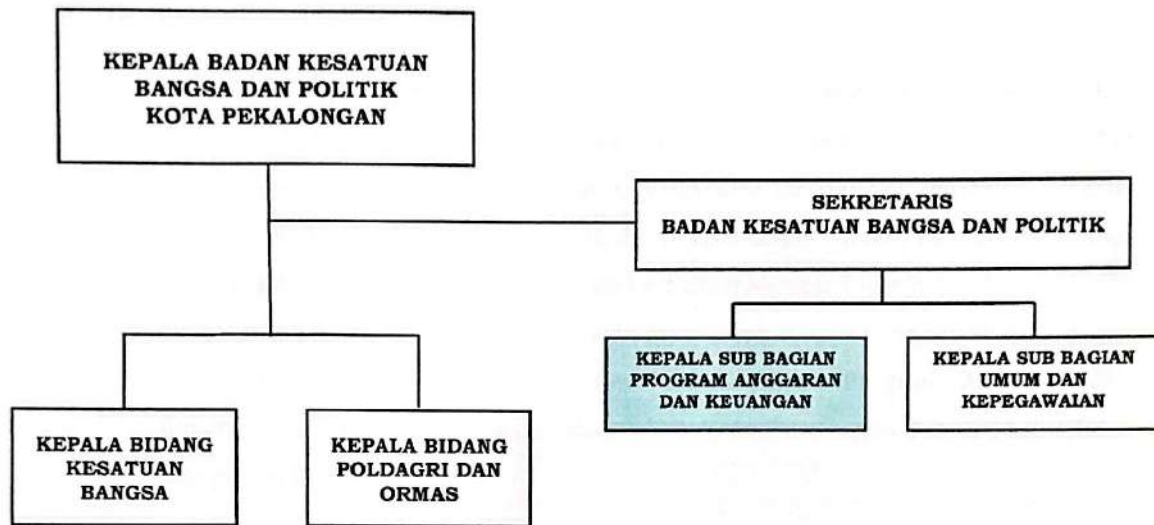
Kepala Sub Bagian Program Anggaran dan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekalongan mempunyai tugas :

1. Menyusun rencana kerja di bidang program anggaran dan keuangan;
2. Menyusun bahan dan melaksanakan koordinasi perencanaan Program, kegiatan, dan anggaran;
3. Mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan, RKA dan RKA Perubahan, DPA dan DPA Perubahan, serta laporan capaian kinerja, ikhtisar realisasi kinerja, dan evaluasi kinerja perangkat daerah;
4. Melaksanakan penyediaan gaji dan tunjangan ASN;
5. Melaksanakan Penata Tk.Iusahaan keuangan;
6. Mengoordinasikan dan melaksanakan fungsi akuntansi;
7. Mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran, dan/atau akhir tahun;
8. Menyusun pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran;
9. Mengelola dan menyiapkan bahan tanggapan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan; dan
10. Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan.

B. Struktur Jabatan

Struktur organisasi jabatan Kepala Sub Bagian Program Anggaran dan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekalongan, sebagaimana gambar 1.1 dibawah ini :

Gambar 1.1 Struktur Organisasi



BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Adapun perjanjian kinerja Kepala Sub Bagian Program Anggaran dan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekalongan Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja
Tahun 2025

No	Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 persen
2	Meningkatnya kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen
3	Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	3 Dokumen
4	Tersusunnya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen
5	Tersusunnya Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15 Laporan
6	Tercapainya Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 orang/bulan
7	Tersusunnya Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen
8	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan

B. Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja Kepala Sub Bagian Program Anggaran dan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekalongan Triwulan II Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi indikator kinerja kegiatan.

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja dengan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Target}}{\text{Realisasi}} \times 100\%$$

3. Rumus Efisiensi

Rumus efisiensi penggunaan sumber daya sebagai berikut :

$$\text{Efisiensi} = \left(\frac{\text{capaian kinerja}}{\text{capaian anggaran}} \right) - 1 \times 100$$

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran sesuai Permendagri No. 54 Tahun 2010, menggunakan interpretasi penilaian dengan pengukuran dengan skala ordinal yaitu:

Tabel 2.2

Pengukuran dengan Skala Ordinal

Skala Ordinal	Predikat / Kategori
90.1 s.d. lebih	Sangat Tinggi / Sangat Berhasil
75.1 s.d. 90	Tinggi / Berhasil
65.1 s.d. 75	Sedang / Cukup Berhasil
50.1 s.d. 65	Rendah / Tidak Berhasil
0 s.d. 50	Sangat Rendah / Sangat Tidak Berhasil

Adapun capaian kinerja Kepala Sub Bagian Program Anggaran dan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekalongan TRIWULAN II Tahun 2025 sebagaimana tabel 2.3 dibawah ini :

Tabel 2.3

**Pengukuran Kinerja Kepala Sub Bagian Program Anggaran dan Keuangan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekalongan**

TRIWULAN II Tahun 2025

No	Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target s/d Triwulan II	Realisasi s/d Triwulan II	% Capaian
1	Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 persen	26,27 persen	26,27 persen	100
2	Meningkatnya kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen	83,33 persen	83,33 persen	100
3	Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100
4	Tersusunnya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	100
5	Tersusunnya Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15 Laporan	7 Laporan	7 Laporan	100
6	Tercapainya Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 orang/bulan	14 orang/bulan	14 orang/bulan	100
7	Tersusunnya Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	100
8	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja Kepala Sub Bagian Program Anggaran dan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekalongan adalah sebesar 100 % dengan kategori "Sangat Tinggi / Sangat Berhasil"

Faktor Pendukung keberhasilan capaian kinerja Triwulan II adalah sebagai berikut:

- 1.) Dukungan, bimbingan dan arahan dari pimpinan / Plt. Kepala Badan Kesbangpol Kota Pekalongan dan Sekretaris Badan Kesbangpol Kota Pekalongan .
- 2.) Kerjasama yang baik dan sinergitas seluruh Karyawan / wati Badan Kesbangpol Kota Pekalongan.
- 3.) Semangat dan etos kerja yang tinggi dalam usaha untuk mencapai target kinerja yang sudah ditetapkan.
- 4.) Pemanfaatan sarana prasarana yang ada secara optimal, walaupun kondisinya terbatas dan sudah tidak berfungsi dengan baik.

C. Kinerja Keuangan

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi telah didukung dengan program dan kegiatan dalam APBD. Adapun realisasi anggaran program dan kegiatan sebagai berikut :

Tabel. 2.4

Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Tahun Anggaran 2025

No	Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Tahunan (Rp)	Target s/d Triwulan II (Rp)	Realisasi s/d Triwulan II (Rp)	% Capaian $\{(5)/(4)*100\}$
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	19.772.000	3.957.000	3.957.000	100
2	Meningkatnya kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.759.774.000	1.380.331.500	878.070.855	63,61
3	Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah	6.624.000	2.392.000	2.392.000	100
4	Tersusunnya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.148.000	552.000	552.000	100
5	Tersusunnya Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.000.000	3.370.000	3.370.000	100
6	Tercapainya Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2.722.835.000	1.361.417.500	859.157.055	63,11
7	Tersusunnya Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	35.875.000	17.850.000	17.850.000	100

8	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.064.000	1.064.000	1.063.800	99,98
---	---	-----------	-----------	-----------	-------

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata realisasi anggaran pada TRIWULAN II adalah sebesar 90,84 %.

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja dan capaian anggaran diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian kinerja sebesar 100% , sedangkan realisasi anggaran sebesar 90,84 %.

BAB I PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja dan capaian anggaran diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian kinerja sebesar 100%, sedangkan realisasi anggaran sebesar 90,84%, sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar 9,16%. Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kinerja dan keuangan Kepala Sub Bagian Program Anggaran dan Keuangan Sangat Baik.

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka yang dapat direkomendasikan untuk perbaikan perencanaan kinerja dalam pelaksanaan kegiatan Kepala Sub Bagian Program Anggaran dan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekalongan Triwulan II Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Mempertahankan kinerja dan meningkatkan kembali agar dapat semakin baik dan optimal.
2. Bekerjasama dengan PPTK dan Kasir Kegiatan untuk lebih mengoptimalkan kembali kinerja dan target kinerja.

Pekalongan, - Juli 2025

Mengetahui
Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Pekalongan



M. Taufiq Rochman, S.STP., MM
NIP. 19780107 199703 1 002

Kepala Sub Bagian Program Anggaran dan Keuangan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Pekalongan

Iman Widiharjo, A.Md
NIP. 19810909 200604 1 005

**LAPORAN KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2025
KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA PEKALONGAN**



**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA PEKALONGAN
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia Nya maka Laporan Kinerja (LKJ) "Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian" Triwulan II Tahun 2025 dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan Kinerja (LKJ) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat umumnya dan Pegawai Negeri Sipil pada khususnya bahwa "Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian" mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa *output* maupun *outcomes*.

Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan capaian kinerja secara berkala dalam pelaksanaan tugas pokok fungsi dan kewenangan di dalam pengelolaan manajemen kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja. Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja "Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian" melalui pelaksanaan kegiatan dengan mendasarkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang telah ditetapkan.

Pekalongan, 1 Juli 2025

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian



SOPAN WIJIAN TO, S.E., M.SI

Penata

NIP. 19830504 201001 1 013

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
DAFTAR TABEL	i
DAFTAR GAMBAR	ii
BAB I PENDAHULUAN	4
A Tugas Jabatan	4
B Struktur Jabatan	5
BAB II AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN	7
A Perjanjian Kinerja	7
B Capaian Kinerja	11
C Capaian Anggaran	15
BAB III PENUTUP	17
A Kesimpulan	17
B Rekomendasi	17

BAB I

PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 82 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Badan.
2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:
 - a. Meningkatkan ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah
 - b. Meningkatkan Ketercapaian administrasi umum perangkat daerah
 - c. Meningkatkan ketercapaian penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah
 - d. Meningkatkan ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah
 - e. Terlaksananya Perintah dan tugas dari Pimpinan/Atasan
 - f. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - g. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - h. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - i. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - j. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - k. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - l. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

- m. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- n. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
- o. Penyediaan Jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
- p. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya
- q. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana
- r. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
- s. Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya

B. Struktur Jabatan

Struktur organisasi jabatan Kepala Sub Politik Dalam Negeri dan Kewaspadaan Dini, Penanganan Konflik Sosial, sebagaimana gambar 1.1 dibawah ini :



BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan Instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan Instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan Indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Adapun perjanjian kinerja Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Tahun 2025

No	Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 persen
2	Meningkatnya Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 persen
3	Meningkatnya Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen
4	Meningkatnya Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen

5	Tercapainya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 paket
6	Tercapainya Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 paket
7	Tercapainya Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 paket
8	Tercapainya Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 paket
9	Tersedianya Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 paket
10	Tersedianya Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket
11	Tersedianya Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokumen
12	Tersusunnya Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Laporan
13	Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan
14	Tersusunnya Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan
15	Tersedianya Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan

16	Terlaksananya Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 unit
17	Terlaksananya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit
18	Terlaksananya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	17 unit
19	Terlaksananya Tugas Lain dan Arahan dari Pimpinan	Jumlah Waktu Pelaksanaan Perintah dan Arahan Pimpinan	12 bulan

B. Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Triwulan II Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi indikator kinerja kegiatan.

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja dengan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Target}}{\text{Realisasi}} \times 100\%$$

3. Rumus Efisiensi

Rumus efisiensi penggunaan sumber daya sebagai berikut :

$$\text{Efisiensi} = \left(\frac{\text{capaian kinerja}}{\text{capaian anggaran}} \right) - 1 \times 100$$

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran sesuai Permendagri No. 54 Tahun 2010, menggunakan interpretasi penilaian dengan pengukuran dengan skala ordinal yaitu:

Tabel 2.2

Pengukuran dengan Skala Ordinal

Skala Ordinal	Predikat / Kategori
90.1 s.d. lebih	Sangat Tinggi / Sangat Berhasil
75.1 s.d. 90	Tinggi / Berhasil
65.1 s.d. 75	Sedang / Cukup Berhasil
50.1 s.d. 65	Rendah / Tidak Berhasil
0 s.d. 50	Sangat Rendah / Sangat Tidak Berhasil

Adapun capaian kinerja Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Triwulan II Tahun 2025 sebagaimana tabel 2.3 dibawah ini :

Tabel 2.3

Pengukuran Kinerja Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Triwulan I Tahun 2024

No	Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target sd Triwulan II	Realisasi sd Triwulan II	% Capaian
1	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 persen	0%	0%	100%
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 persen	42,14%	42,14%	100%
3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	50%	50%	100%
4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	Persentase ketercapaian Pemeliharaan	100 persen	40,78%	40,78%	100%

No	Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target sd Triwulan II	Realisasi sd Triwulan II	% Capaian
	Urusan Pemerintahan Daerah	Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
5	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 paket	0 paket	0 paket	100%
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 paket	2 Paket	2 Paket	100%
7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 paket	2 Paket	2 Paket	100%
8	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 paket	2 Paket	2 Paket	100%
9	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 paket	2 Paket	2 Paket	100%
10	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	1 paket	1 paket	100%
11	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	100%

No	Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target sd Triwulan II	Realisasi sd Triwulan II	% Capaian
12	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Laporan	18 Laporan	18 Laporan	100%
13	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100%
14	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	100%
15	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	100%
16	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 unit	4 unit	4 unit	100%
17	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	1 unit	0 unit	0 unit	100%
18	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/	17 unit	14 unit	14 unit	100%

No	Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target sd Triwulan II	Realisasi sd Triwulan II	% Capaian
		Direhabilitasi				
19	Pelaksanaan Tugas Lain dan Arahan dari Pimpinan	Jumlah Waktu Pelaksanaan Perintah dan Arahan Pimpinan	12 bulan	6 Bulan	6 Bulan	100%
Rata-rata Capaian						100%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja “Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian” adalah sebesar 100 % dengan kategori “Sangat tinggi/Sangat berhasil”.

Faktor Pendukung keberhasilan capaian kinerja pada Triwulan I ini adalah sebagai berikut:

- 1.) Dukungan, bimbingan dan arahan dari pimpinan / Plt. Kepala Badan Kesbangpol Kota Pekalongan.
- 2.) Kerjasama yang baik dan sinergitas seluruh Karyawan / wati Badan Kesbangpol Kota Pekalongan.
- 3.) Semangat dan etos kerja yang tinggi dalam usaha untuk mencapai target kinerja yang sudah ditetapkan.
- 4.) Pemanfaatan yang optimal dari peralatan dan perlengkapan kantor yang sudah ada, walaupun kondisinya terbatas dan sudah tidak berfungsi baik.

C. Capaian Anggaran

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi telah didukung dengan program dan kegiatan dalam APBD. Adapun realisasi anggaran program dan kegiatan sebagai berikut :

Tabel. 2.4

Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Tahun Anggaran 2025

No	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Tahunan (Rp)	Target s.d. Triwulan II (Rp)	Realisasi s.d. Triwulan II (Rp)	% Capaian $\{(5)/(4)*100\}$
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	5.000.000	0	0	100%
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	48.650.000	36.007.915	36.007.915	100%
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.650.000	1.146.000	1.146.000	100%
4	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	3.500.000	1.002.500	1.002.500	100%
5	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	18.500.000	9.707.000	9.707.000	100%
6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.060.000	848.000	848.000	100%
7	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.890.000	480.000	480.000	100%
8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	59.340.000	23.216.100	23.216.100	100%
9	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	730.000	210.000	210.000	100%
10	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	57.900.000	21.544.290	21.544.290	100%
11	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	208.730.000	103.484.824	103.484.824	100%
12	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	58.410.000	12.996.000	12.996.000	100%
13	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	188.140.000	11.366.500	11.366.500	100%
14	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7.750.000	4.019.000	4.019.000	100%
Rata-rata Capaian					100%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata realisasi anggaran pada Triwulan II adalah sebesar 100 %.

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja dan capaian anggaran diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian kinerja sebesar 100% , Sedangkan realisasi anggaran sebesar 100%,

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja dan capaian anggaran diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian kinerja sebesar 100% , sedangkan realisasi anggaran sebesar 100%, Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kinerja dan keuangan Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sangat Baik.

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka yang dapat direkomendasikan untuk perbaikan perencanaan kinerja dalam pelaksanaan kegiatan Kepala Sub. Bagian Umum dan dan Kepegawaian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekalongan Triwulan I Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Mempertahankan kinerja dan meningkatkan kembali agagr dapat semakin baik dan optimal.
2. Bekerjasama dengan PPTK dan Kasir Kegiatan untuk lebih mengoptimalkan kembali kinerja dan target kinerja.

Pekalongan, 9 Juli 2025

Mengetahui
Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Pekalongan



M. TAUFIQU ROCHMAN, S.STP.M.M
NIP. 19670423 198603 1 003

Kepala Sub. Bagian Umum dan
Kepegawaian



SOPAN WIJANTO, SE.M.Si
NIP. 19830504 201001 1 013

LAPORAN KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2025
ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA



BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PEKALONGAN
TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia Nya maka Laporan Kinerja (LKj) "Analisis Kebijakan Ahli Pertama" Triwulan II Tahun 2025 dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat umumnya dan Pegawai Negeri Sipil pada khususnya bahwa "Analisis Kebijakan Ahli Pertama" mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa *output* maupun *outcomes*.

Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan capaian kinerja secara berkala dalam pelaksanaan tugas pokok fungsi dan kewenangan di dalam pengelolaan manajemen kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja. Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja "Analisis Kebijakan Ahli Pertama" melalui pelaksanaan tugas dengan mendasarkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang telah ditetapkan.

Pekalongan, 1 Juli 2025

Analisis Kebijakan Ahli Pertama



ADILA NAUFAL FAQIH, S.Ak

Penata Muda

NIP. 19981225 202504 1 007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A Tugas Jabatan	1
B Struktur Jabatan	2
BAB II AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN	2
A Perjanjian Kinerja	3
B Capaian Kinerja	4
BAB III PENUTUP	8
A Kesimpulan	8
B Rekomendasi	8

BAB I

PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok

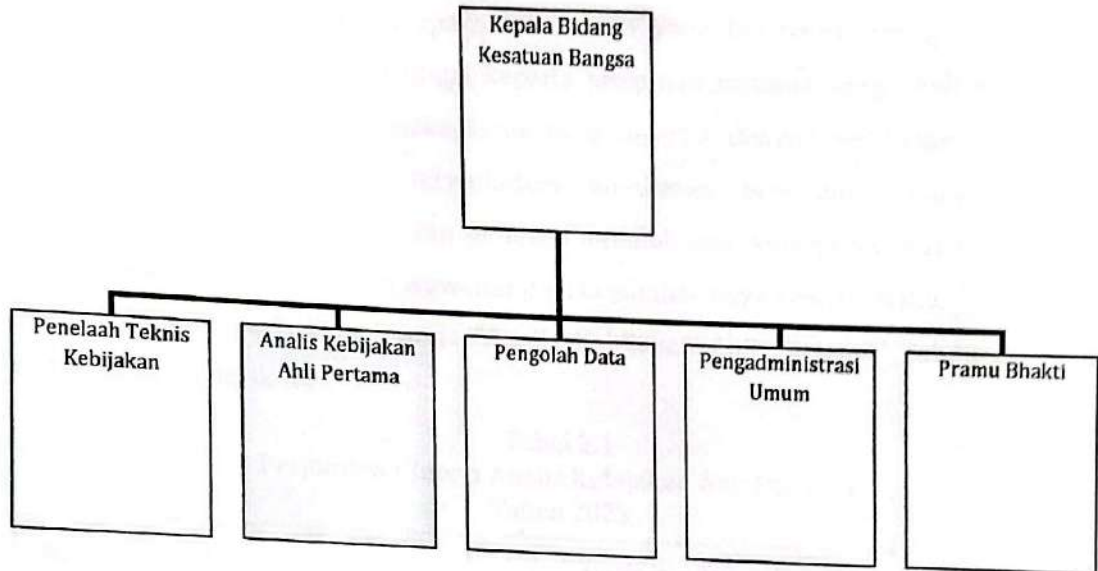
Berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 59A Tahun 2021 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Pegawai Negeri Sipil pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekalongan, "Analisis Kebijakan Ahli Pertama" mempunyai uraian tugas jabatan adalah sebagai berikut :

1. Tercapainya Jumlah Keluarga yang mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara.
2. Tercapainya jumlah orang yang mengikuti koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah.
3. Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.
4. Mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis Bidang Kesatuan Bangsa.
5. Melaksanakan kegiatan di lingkup kesatuan bangsa.
6. Menyusun laporan kegiatan di lingkup kesatuan bangsa.
7. Menjalankan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya.
8. Merumuskan issue-issue kebijakan ke dalam rumusan masalah kebijakan.

B. Struktur Jabatan

Struktur organisasi jabatan "Analisis Kebijakan Ahli Pertama", sebagaimana gambar 1.1 dibawah ini :

Gambar 1.1 Struktur Organisasi



BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Adapun perjanjian kinerja "Analisis Kebijakan Ahli Pertama" Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Analisis Kebijakan Ahli Pertama
Tahun 2025

No	Uraian Tugas	Indikator Kinerja	Target
1.	Tercapainya Jumlah Keluarga yang mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara.	Jumlah Keluarga yang mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara.	874 Orang
2.	Tercapainya jumlah orang yang mengikuti koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah.	Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah	432 Orang

No	Uraian Tugas	Indikator Kinerja	Target
3.	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	235 Orang
4.	Mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis Bidang Kesatuan Bangsa	Jumlah dokumen pengadaan barang dan jasa di bidang kesatuan bangsa	8 Dokumen
5.	Melaksanakan kegiatan di lingkup kesatuan bangsa	Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan di lingkup kesatuan bangsa	1 Laporan
6.	Menyusun laporan kegiatan di lingkup kesatuan bangsa	Jumlah Laporan kegiatan di lingkup kesatuan bangsa	2 Laporan
7.	Menjalankan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya	Jumlah Laporan kegiatan di lingkup kesatuan bangsa	10 Laporan
8.	Merumuskan issue-issue kebijakan ke dalam rumusan masalah kebijakan	Jumlah dokumen rumusan masalah kebijakan teknis di Bidang Kesatuan Bangsa	1 Dokumen

B. Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja "Analisis Kebijakan Ahli Pertama" Triwulan II Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi indikator kinerja kegiatan.

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Target}}{\text{Realisasi}} \times 100\%$$

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran sesuai Permendagri No. 54 Tahun 2010, menggunakan interpretasi penilaian dengan pengukuran dengan skala ordinal yaitu:

Tabel 2.2
Pengukuran dengan Skala Ordinal

Skala Ordinal	Predikat / Kategori
90.1 s.d. lebih	Sangat Tinggi / Sangat Berhasil
75.1 s.d. 90	Tinggi / Berhasil
65.1 s.d. 75	Sedang / Cukup Berhasil
50.1 s.d. 65	Rendah / Tidak Berhasil
0 s.d. 50	Sangat Rendah / Sangat Tidak Berhasil

Adapun capaian kinerja "Analisis Kebijakan Ahli Pertama" Triwulan II Tahun 2025 sebagaimana tabel 2.3 dibawah ini :

Tabel 2.3
Pengukuran Kinerja "Analisis Kebijakan Ahli Pertama"
Triwulan II Tahun 2025

No	Uraian Tugas	Indikator Kinerja	Target	Target Triwulan II	Realisasi Triwulan II	% Capaian
1	Tercapainya Jumlah Keluarga yang mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara.	Jumlah Keluarga yang mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara.	874 Orang	317 Orang	317 Orang	100%

No	Uraian Tugas	Indikator Kinerja	Target	Target Triwulan II	Realisasi Triwulan II	% Capaian
2	Tercapainya jumlah orang yang mengikuti koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah.	Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah	432 Orang	136 Orang	136 Orang	100%
3	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	235 Orang	200 Orang	200 Orang	100%
4	Mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis Bidang Kesatuan Bangsa	Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan di lingkup kesatuan bangsa	8	3	3	100%
5	Melaksanakan kegiatan di lingkup kesatuan bangsa	Jumlah Laporan kegiatan di lingkup kesatuan bangsa	1	1	1	100%

No	Uraian Tugas	Indikator Kinerja	Target	Target Triwulan II	Realisasi Triwulan II	% Capaian
6	Menyusun laporan kegiatan di lingkup kesatuan bangsa	Jumlah Laporan kegiatan di lingkup kesatuan bangsa	2	1	1	100%
7	Menjalankan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya	Jumlah Laporan kegiatan di lingkup kesatuan bangsa	10	3	3	100%
8	Merumuskan issue-issue kebijakan ke dalam rumusan masalah kebijakan	Jumlah dokumen rumusan masalah kebijakan teknis di Bidang Kesatuan Bangsa	1	1	1	100%
TOTAL						100%

Dari tabel 2.3 di atas rata-rata pencapaian kinerja Analis Kebijakan Ahli Pertama pada Bidang Kesatuan Bangsa Badan Kesbangpol Kota Pekalongan adalah sebesar 100% dengan kategori Sangat Tinggi/Sangat Berhasil, faktor pendukung keberhasilannya sebagai berikut :

1. Adanya Perwal tentang tugas pokok dan fungsi (Perwal Nomor 96 Tahun 2023) dan SOP Anallis Kebijakan Ahli Pertama sebagai pedoman;
2. Monitoring dan Evaluasi pimpinan secara rutin tiap minggu;
3. Sarana dan prasarana yang memadai.

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran kegiatan diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian kinerja "Analisis Kebijakan Ahli Pertama" adalah sebesar 100% dengan kategori "Sangat Tinggi/Sangat Berhasil".

B. Rekomendasi


Berdasarkan kesimpulan diatas, maka yang dapat direkomendasikan untuk perbaikan perencanaan kinerja dalam "Analisis Kebijakan Ahli Pertama" Triwulan II Tahun 2025 adalah sebagai berikut :


1. Penambahan penyediaan sarana dan prasarana penunjang kinerja;
2. Peningkatan SDM secara kuantitatif dan kualitatif;
3. Peningkatan kedisiplinan dalam pelaksanaan kegiatan.

Pekalongan, 1 Juli 2025

Mengetahui
KEPALA BIDANG KESATUAN BANGSA,

ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA,


NUR SLAMET B., S.Pi., M.Si
NIP. 19721201 199903 1 005


ADILA NAUTIL FAQIH, S.Ak
NIP. 19981225 202504 1 007

LAPORAN KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2025
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN



BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PEKALONGAN
TAHUN 2025

Laporan Kinerja Triwulan II "Penelaah Teknis Kebijakan" | "Badan Kesatuan Bangsa dan Politik", 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia Nya maka Laporan Kinerja (LKj) "Penelaah Teknis Kebijakan" Triwulan II Tahun 2025 dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat umumnya dan Pegawai Negeri Sipil pada khususnya bahwa "Penelaah Teknis Kebijakan" mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa *output* maupun *outcomes*.

Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan capaian kinerja secara berkala dalam pelaksanaan tugas pokok fungsi dan kewenangan di dalam pengelolaan manajemen kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja. Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja "Penelaah Teknis Kebijakan" melalui pelaksanaan tugas dengan mendasarkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang telah ditetapkan.

Pekalongan, 1 Juli 2025

Penelaah Teknis Kebijakan



SUCI YULIANA HIDAYATI, S.IP

(Penata Muda Tk. I)

NIP. 199607072020122016

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A Tugas Jabatan	1
B Struktur Jabatan	1
BAB II AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN	2
A Perjanjian Kinerja	2
B Capaian Kinerja	2
BAB III PENUTUP	5
A Kesimpulan	5
B Rekomendasi	5

BAB I

PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 82 Tahun 2020 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Pegawai Negeri Sipil pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekalongan, "Penelaah Teknis Kebijakan" mempunyai uraian tugas jabatan adalah sebagai berikut :

1. Menyusun bahan-bahan kerja sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk keperluan penyelesaian pekerjaan
2. Menganalisa serta menelaah bahan-bahan sesuai dengan obyek kerja dalam bidangnya agar memperlancar pelaksanaan tugas
3. Melaksanakan kajian berdasarkan permasalahan obyek kerja dalam rangka menyelesaikan pekerjaan
4. Menyusun laporan berdasarkan hasil kerja untuk disampaikan kepada pimpinan unit agar hasil telaahan dapat bermanfaat
5. Menyusun saran/rekomendasi berdasarkan pelaksanaan pekerjaan dan pemanfaatannya untuk disampaikan kepada pimpinan unit
6. Melaksanakan tugas/perintah atasan atau pimpinan
7. Kasir Kegiatan
8. Melaksanakan kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
9. Melaksanakan koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
10. Melaksanakan kegiatan Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara
11. Melaksanakan pembinaan aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka

12. Melaksanakan koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
13. Melaksanakan koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

B. Struktur Jabatan

Struktur organisasi jabatan “Penelaah Teknis Kebijakan”, sebagaimana gambar 1.1 dibawah ini :

Gambar 1.1 Struktur Organisasi



BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Adapun perjanjian kinerja "Penelaah Teknis Kebijakan" Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Penelaah Teknis Kebijakan
Tahun 2025

No	Uraian Tugas	Indikator Kinerja	Target
1	Menyusun bahan-bahan kerja sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk keperluan penyelesaian pekerjaan	Jumlah dokumen bahan kerja yang disusun	12 dokumen
		Tingkat ketepatan waktu menyusun bahan kerja sesuai dengan prosedur yang berlaku	12 Bulan
2	Menganalisa serta menelaah bahan-bahan sesuai dengan obyek kerja dalam bidangnya agar memperlancar pelaksanaan tugas	Jumlah dokumen bahan kerja yang dianalisis	12 dokumen
		Tingkat ketepatan waktu menganalisa serta menelaah bahan-bahan sesuai dengan obyek kerja	12 Bulan
3	Melaksanakan kajian berdasarkan permasalahan obyek kerja dalam rangka menyelesaikan pekerjaan	Jumlah dokumen yang dikaji	12 dokumen
		Tingkat ketepatan waktu melaksanakan kajian	12 Bulan
4	Menyusun laporan	Jumlah laporan yang disusun	12 laporan

No	Uraian Tugas	Indikator Kinerja	Target
	berdasarkan hasil kerja untuk disampaikan kepada pimpinan unit agar hasil telaahan dapat bermanfaat	Tingkat ketepatan waktu menyusun laporan	12 Bulan
5	Menyusun saran/rekomendasi berdasarkan pelaksanaan pekerjaan dan pemanfaatannya untuk disampaikan kepada pimpinan unit	Jumlah dokumen saran/rekomendasi yang disusun	12 dokumen
		Tingkat ketepatan waktu menyusun saran/rekomendasi	12 Bulan
6	Melaksanakan tugas/perintah atasan atau pimpinan	Jumlah tugas/perintah atasan atau pimpinan	100 berkas/dokumen/kegiatan
		Tingkat ketepatan waktu pelaksanaan tugas/perintah atasan atau pimpinan	12 Bulan
7	Kasir Kegiatan	Tingkat ketepatan dalam penyelesaian dokumen	12 berkas/dokumen/kegiatan
		Jumlah bulan yang terlaksana	12 Bulan
8	Melaksanakan kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi wasbang	0 Orang
		Jumlah anggaran kebijakan di bidang ideologi wasbang yang terlaksana	Rp 0
9	Melaksanakan koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan koordinasi di bidang ideologi wasbang	1615 Orang
		Jumlah anggaran koordinasi di bidang ideologi wasbang yang terlaksana	Rp 213.525.000

No	Uraian Tugas	Indikator Kinerja	Target
10	Melaksanakan kegiatan Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah keluarga yang mengikuti pembentukan dan penumbuhan karakter	1104 Keluarga
		Jumlah anggaran yang mengikuti pembentukan dan penumbuhan karakter keluarga yang terlaksana	Rp 1.235.340.000
11	Melaksanakan pembinaan aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	Laporan hasil pembinaan aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	1 Dokumen
		Jumlah anggaran pembinaan yang terlaksana	Rp 535.943.000
12	Melaksanakan koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di bidang kewaspadaan dini	682 Orang
		Jumlah anggaran koordinasi di bidang kewaspadaan dini	Rp 257.087.000
13	Melaksanakan koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi,	Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di bidang ketahanan ekonomi	150 Orang

No	Uraian Tugas	Indikator Kinerja	Target
	Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah anggaran koordinasi di bidang ketahanan ekonomi	Rp 67.527.000

B. Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja "Penelaah Teknis Kebijakan" Triwulan II Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi indikator kinerja kegiatan.

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Target}}{\text{Realisasi}} \times 100\%$$

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran sesuai Permendagri No. 54 Tahun 2010, menggunakan interpretasi penilaian dengan pengukuran dengan skala ordinal yaitu:

Tabel 2.2

Pengukuran dengan Skala Ordinal

Skala Ordinal	Predikat / Kategori
90.1 s.d. lebih	Sangat Tinggi / Sangat Berhasil
75.1 s.d. 90	Tinggi / Berhasil
65.1 s.d. 75	Sedang / Cukup Berhasil
50.1 s.d. 65	Rendah / Tidak Berhasil
0 s.d. 50	Sangat Rendah / Sangat Tidak Berhasil

Adapun capaian kinerja "Penelaah Teknis Kebijakan" Triwulan II Tahun 2025 sebagaimana tabel 2.3 dibawah ini :

Tabel 2.3
Pengukuran Kinerja "Penelaah Teknis Kebijakan"
Triwulan II Tahun 2025

No	Uraian Tugas	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target s.d. Triwulan II	Realisasi s.d. dengan Triwulan II	% Capaian
1	Menyusun bahan-bahan kerja sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk keperluan penyelesaian pekerjaan	Jumlah dokumen bahan kerja yang disusun	12 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	100%
		Tingkat ketepatan waktu menyusun bahan kerja sesuai dengan prosedur yang berlaku	12 Bulan	6 bulan	6 bulan	100%
2	Menganalisa serta menelaah bahan-bahan sesuai dengan obyek kerja dalam bidangnya agar memperlancar pelaksanaan tugas	Jumlah dokumen bahan kerja yang dianalisis	12 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	100%
		Tingkat ketepatan waktu menganalisa serta menelaah bahan-bahan sesuai dengan obyek kerja	12 Bulan	6 bulan	6 bulan	100%
3	Melaksanakan kajian berdasarkan permasalahan obyek kerja dalam rangka menyelesaikan pekerjaan	Jumlah dokumen yang dikaji	12 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	100%
		Tingkat ketepatan waktu melaksanakan kajian	12 Bulan	6 bulan	6 bulan	100%
4	Menyusun laporan berdasarkan hasil kerja untuk disampaikan kepada pimpinan unit agar hasil telaahan dapat bermanfaat	Jumlah laporan yang disusun	12 laporan	6 laporan	6 laporan	100%
		Tingkat ketepatan waktu menyusun laporan	12 Bulan	6 bulan	6 bulan	100%
5	Menyusun saran/rekomendasi berdasarkan	Jumlah dokumen saran/rekomendasi yang disusun	12 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	100%

No	Uraian Tugas	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target s.d. Triwulan II	Realisasi s.d. dengan Triwulan II	% Capaian
	pelaksanaan pekerjaan dan pemanfaatannya untuk disampaikan kepada pimpinan unit	Tingkat ketepatan waktu menyusun saran/rekomendasi	12 Bulan	6 bulan	6 bulan	100%
6	Melaksanakan tugas/perintah atasan atau pimpinan	Jumlah tugas/perintah atasan atau pimpinan	100 berkas/dokumen/kegiatan	50 berkas/dokumen/kegiatan	50 berkas/dokumen/kegiatan	100%
		Tingkat ketepatan waktu pelaksanaan tugas/perintah atasan atau pimpinan	12 Bulan	6 bulan	6 bulan	100%
7	Kasir Kegiatan	Tingkat ketepatan dalam penyelesaian dokumen	12 berkas/dok/kegiatan	6 berkas/dok/kegiatan	6 berkas/dok/kegiatan	100%
		Jumlah bulan yang terlaksana	12 Bulan	6 bulan	6 bulan	100%
8	Melaksanakan kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi wasbang	0 Orang	0 orang	0 orang	100%
		Jumlah anggaran kebijakan di bidang ideologi wasbang yang terlaksana	Rp 0	Rp 0	Rp 0	100%
9	Melaksanakan koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan koordinasi di bidang ideologi wasbang	1615 Orang	220 orang	220 orang	100%
		Jumlah anggaran koordinasi di bidang ideologi wasbang yang terlaksana	Rp 213.525.000	Rp 41.961.276	Rp 41.961.276	100%

No	Uraian Tugas	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target s.d. Triwulan II	Realisasi s.d. dengan Triwulan II	% Capaian
10	Melaksanakan kegiatan Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah keluarga yang mengikuti pembentukan dan penumbuhan karakter	1104 Keluarga	527 orang	527 orang	100%
		Jumlah anggaran yang mengikuti pembentukan dan penumbuhan karakter keluarga yang terlaksana	Rp 1.235.340.000	Rp 422.094.620	Rp 422.094.620	100%
11	Melaksanakan pembinaan aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	Laporan hasil pembinaan aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	1 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	100%
		Jumlah anggaran pembinaan yang terlaksana	Rp 535.943.000	Rp 29.254.600	Rp 29.254.600	100%
12	Melaksanakan koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di bidang kewaspadaan dini	432 Orang	236 orang	236 orang	100%
		Jumlah anggaran koordinasi di bidang kewaspadaan dini	Rp 257.087.000	Rp 141.764.600	Rp 141.764.600	100%

No	Uraian Tugas	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target s.d. Triwulan II	Realisasi s.d. dengan Triwulan II	% Capaian
13	Melaksanakan koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di bidang ketahanan ekonomi	235 Orang	200 orang	200 orang	100%
		Jumlah anggaran koordinasi di bidang ketahanan ekonomi	Rp 67.527.000	Rp 34.592.100	Rp 34.592.100	100%
Rata-rata Capaian						100%

Dari tabel 2.3 di atas rata-rata pencapaian kinerja Penelaah Teknis Kebijakan pada Bidang Kesatuan Bangsa Badan Kesbangpol Kota Pekalongan adalah sebesar 100% dengan kategori Sangat Tinggi/Sangat Berhasil, faktor pendukung keberhasilannya sebagai berikut :

1. Adanya Perwal tentang tugas pokok dan fungsi (Perwal Nomor 82 Tahun 2020) dan SOP Penelaah Teknis Kebijakan sebagai pedoman;
2. Monitoring dan Evaluasi pimpinan secara rutin tiap minggu;
3. Sarana dan prasarana yang memadai.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran kegiatan diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian kinerja "Penelaah Teknis Kebijakan" adalah sebesar 100% dengan kategori "Sangat Tinggi/Sangat Berhasil".

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka yang dapat direkomendasikan untuk perbaikan perencanaan kinerja dalam "Penelaah Teknis Kebijakan" Triwulan II Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

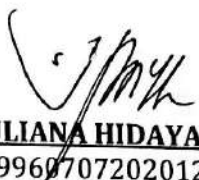
1. Penambahan penyediaan sarana dan prasarana penunjuang kinerja;
2. Peningkatan SDM secara kuantitatif dan kualitatif;
3. Peningkatan kedisiplinan dalam pelaksanaan kegiatan.

Mengetahui
KEPALA BIDANG KESATUAN BANGSA,

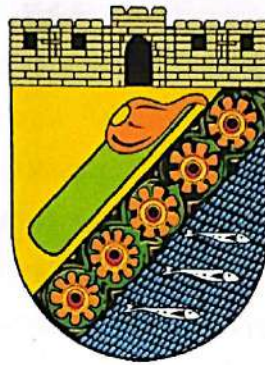

NUR SLAMET B., S.Pi., M.Si
NIP. 197212011999031005

Pekalongan, 1 Juli 2025

PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN,


SUCI YULIANA HIDAYATI, S.IP
NIP. 199607072020122016

**LAPORAN KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2025
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN
PADA BIDANG POLITIK DALAM NEGERI DAN
ORGANISASI KEMASYARAKATAN
BADAN KESBANGPOL KOTA PEKALONGAN**



**BADAN KESBANGPOL KOTA PEKALONGAN
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia Nya maka Laporan Kinerja (LKj) Pengadministrasi Perkantoran Badan Kesbangpol Kota Pekalongan Triwulan II Tahun 2025 dapat diselesaikan tepat pada waktu yang telah ditentukan. Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat umumnya dan Pegawai Negeri Sipil pada khususnya bahwa Pengadministrasi Perkantoran Badan Kesbangpol Kota Pekalongan mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa *output* maupun *outcomes*

Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan tugas pokok fungsi dan kewenangan di dalam pengelolaan manajemen kinerja dan reformasi birokrasi sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja. Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efesiensi kinerja Pengadministrasi Perkantoran Badan Kesbangpol Kota Pekalongan melalui pelaksanaan seksi kegiatan dengan mendasarkan pada Perjanjian Kinerja tahun 2025 yang telah ditetapkan.

Pekalongan, 1 Juli 2025

Pengadministrasi Perkantoran


KARTOLO

Penata Muda

NIP. 19750518 200604 1 008

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI.....	3
DAFTAR TABEL.....	
DAFTAR GAMBAR.....	
BAB I PENDAHULUAN.....	4
A.	
B. TugasJabatan.....	4
C. StrukturJabatan.....	4
BAB II AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN.....	5
A. Perjanjian Kinerja.....	5
B. Capaian Kinerja.....	6
BAB III PENUTUP.....	9
A. Kesimpulan.....	9
B. Rekomendasi.....	9

BAB I

PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 82 Tahun 2020 Tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Kesbangpol, Pengadministrasi Perkantoran Pada Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan Badan Kesbangpol mempunyai tugas dan fungsi membantu Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan Badan Kesbangpol Kota Pekalongan.

B. Struktur Jabatan

Struktur organisasi jabatan Pengadministrasi Perkantoran Badan Kesbangpol Kota Pekalongan, sebagaimana gambar 1.1 dibawah ini:



BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumberdaya yang tersedia.

Adapun perjanjian kinerja Pengadministrasi Perkantoran Pada Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan Badan Kesbangpol Kota Pekalongan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja

Pengadministrasi Perkantoran Badan Kesbangpol Kota Pekalongan Tahun 2025

No (1)	Sasaran Kegiatan (2)	Indikator Kinerja (3)	Satuan (4)	Target (5)
1	Menerima, mencatat, dan menyortir surat/dokumen/berkas, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan pencairan	Menyusun surat/dokumen untuk pengendalian	Berkas	130
2	Memberi lembar pengantar pada surat/dokumen/berkas, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan pengendalian	Pengelompokan surat / dokumen untuk memudahkan pencarian	Berkas	135
3	Mengelompokkan surat/dokumen/berkas	Pengelompokan Surat / Dokumen	Berkas	75

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	menurut jenis dan sifatnya, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan pendistribusian	/ Berkas untuk Pendistribusian		
4	Mengadministrasikan dan mendokumentasikan surat/dokumen/berkas sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar tertib administrasi	Jumlah Dokumentasi Kegiatan/ Sosialisasi dan administrasi surat yang tersusun sesuai dengan prosedur	Berkas	125
5	Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban	Jumlah Pelaporan kepada Atasan/Pimpinan	Data	100
6	Melaksanakan tugas dan perintah atasan atau pimpinan	Jumlah Pelaksanaan Tugas Sesuai Perintah Atasan	Data	8

B. Capaian Kinerja

Capaian kinerja Pengadministrasi Perkantoran Pada Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Masyarakat Badan Kesbangpol Kota Pekalongan tahun 2025 dilakukan

6

Laporan Kinerja Pengadministrasi Perkantoran Pada Bidang Politik dalam Negeri dan Organisasi Masyarakat
| Badan Kesbangpol Kota Pekalongan Tahun 2025

dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja kegiatan dan didukung dengan data-data yang mendukung relevan.

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran sesuai Permendagri No.54 Tahun 2010, menggunakan interpretasi penilaian dengan pengukuran dengan skala ordinal yaitu:

Tabel 2.2
Pengukuran dengan Skala Ordinal

Skala Ordinal	Predikat / Kategori
90.1 s.d. lebih	Sangat Tinggi / Sangat Berhasil
75.1 s.d. 90	Tinggi / Berhasil
65.1 s.d. 75	Sedang / Cukup Berhasil
50.1 s.d. 65	Rendah / Tidak Berhasil
0 s.d. 50	Sangat Rendah / Sangat Tidak Berhasil

Adapun capaian kinerja Pengadministrasi Perkantoran Pada Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan Badan Kesbangpol Kota Pekalongan tahun 2025 Triwulan II sebagaimana tabel 2.3 dibawah ini:

Tabel 2.3
Pengukuran Kinerja Pengadministrasi Perkantoran Pada Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan pada
Badan Kesbangpol Kota Pekalongan
Triwulan II Tahun 2025

No	Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Target s.d Triwulan II	Realisasi s.d Triwulan II	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Menerima, mencatat, dan menyortir surat/dokumen/berkas, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan pencairan	Menyusun surat/dokumen untuk pengendalian	Berkas	130	55	55	100 %
2	Memberi lembar pengantar pada surat/dokumen/berkas, sesuai dengan prosedur dan	Pengelompokan surat / dokumen untuk memudahkan pencarian	Berkas	135	70	70	100 %

No	Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Target s.d Triwulan II	Realisasi s.d Triwulan II	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	ketentuan yang berlaku, agar memudahkan pengendalian						
3	Mengelompokkan surat/dokumen/berkas menurut jenis dan sifatnya, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan pendistribusian	Pengelompokan Surat / Dokumen / Berkas untuk Pendistribusian	Berkas	75	40	40	100 %
4	Mengadministrasikan dan mendokumentasikan surat/dokumen/berkas sesuai dengan prosedur dan	Menyusun surat/dokumen untuk pengendalian	Berkas	125	75	75	100 %

No	Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Target s.d Triwulan II	Realisasi s.d Triwulan II	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	ketentuan yang berlaku, agar tertib administrasi						
5	Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban	Jumlah Pelaporan kepada Atasan/Pimpinan	Data	100	50	50	100 %
6	Melaksanakan tugas dan perintah atasan atau pimpinan	Jumlah Pelaksanaan Tugas Sesuai Perintah Atasan	Data	8	4	4	100 %
Rata-rata Capaian							100 %

Dari tabel 2.3 tersebut dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja Pengadministrasi Perkantoran Badan Kesbangpol Kota Pekalongan adalah sebesar 100% dengan kategori "**Sangat Tinggi/ Sangat Berhasil**".

Faktor Pendukung keberhasilan capaian kinerja pada Triwulan II yang sangat tinggi ini disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut :

1. Adanya Perwal Nomor 82 Tahun 2020 tentang Tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Kesbangpol, Pengadministrasi Perkantoran Pada Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan Badan Kesbangpol dimana Pengadministrasi Perkantoran bertanggung jawab langsung kepada Kepala Seksi.
2. Melakukan Peng SPJ an sesuai tenggang waktu yang sudah ditentukan
3. Rutinnya pelaksanaan Monitoring situasi daerah dalam setiap bulan

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran program dan kegiatan diatas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja sebesar 100% dengan kategori Sangat Tinggi/Sangat Berhasil.


B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka yang dapat direkomendasikan untuk perbaikan perencanaan kinerja dalam pelaksanaan kegiatan Pengadministrasi Perkantoran Badan Kesbangpol Kota Pekalongan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Perlu dilakukan evaluasi kegiatan agar selaras dan relevan dengan program dan sasaran jangka menengah perangkat daerah yang akan dicapai.
2. Penetapan Indikator Kinerja Individu yang mengacu pada Indikator kinerja organisasi

Pekalongan, 1 Juli 2025

Mengetahui
KEPALA BIDANG POLITIK DALAM NEGERI
DAN ORGANISASI KEMASYARKATAN



NUGROHO ADHI PRADHANA, SE.,M.Si

Pembina

NIP. 19740805 199903 1 005

PENGADMINISTRASI PERKANTORAN



KARTOLO

Penata Muda

NIP. 19750518 200604 1 008

LAPORAN KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2025
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN



BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PEKALONGAN
TAHUN 2025



Laporan Kinerja Triwulan II "Pengadministrasi Perkantoran" | "Badan Kesatuan Bangsa dan Politik", 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia Nya maka Laporan Kinerja (LKj) "Pengadministrasi Perkantoran" Triwulan II Tahun 2025 dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat umumnya dan Pegawai Negeri Sipil pada khususnya bahwa "Pengadministrasi Perkantoran" mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa *output* maupun *outcomes*.

Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan capaian kinerja secara berkala dalam pelaksanaan tugas pokok fungsi dan kewenangan di dalam pengelolaan manajemen kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja. Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja "Pengadministrasi Perkantoran" melalui pelaksanaan tugas dengan mendasarkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang telah ditetapkan.

Pekalongan, 1 Juli 2025

Pengadministrasi Perkantoran



Muhamad Bilfi

Pengatur (II/c)

NIP. 19790724 2008701 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A Tugas Jabatan	1
B Struktur Jabatan	1
BAB II AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN	2
A Perjanjian Kinerja	2
B Capaian Kinerja	2
BAB III PENUTUP	5
A Kesimpulan	5
B Rekomendasi	5

BAB I

PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok

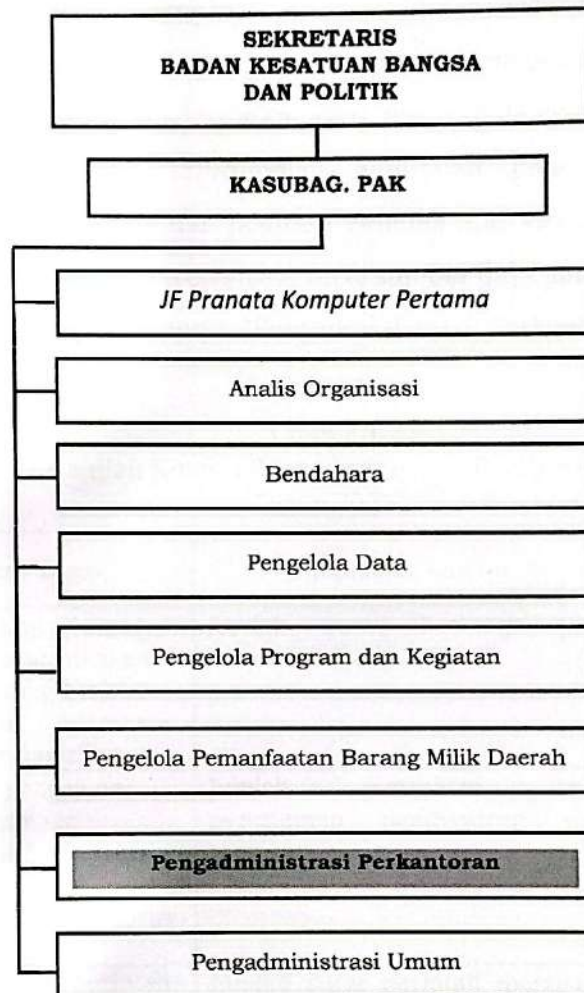
Berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 96 Tahun 2023 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Pegawai Negeri Sipil pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekalongan, "Pengadministrasi Perkantoran" mempunyai uraian tugas jabatan adalah sebagai berikut :

1. Mengelola uang / surat berharga sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk bahan pertanggungjawaban
2. Menyusun pengajuan surat permintaan pembayaran ke BPKAD berdasarkan surat perintah untuk mengurus keuangan
3. Menyusun surat perintah membayar (SPM) berdasarkan prosedur yang berlaku untuk penerimaan uang
4. Melaksanakan pembayaran atas tagihan-tagihan berdasarkan surat dinas untuk kelancaran pelaksanaan tugas
5. Melaksanakan permintaan uang muka berdasarkan surat perintah untuk kelancaran pelaksanaan tugas
6. Menyusun pencatatan penerimaan dan pengeluaran uang di dalam formulir daftar penerimaan dan pengeluaran yang telah ditetapkan sesuai prosedur yang berlaku untuk bahan lampiran laporan
7. Menyusun laporan mengenai permintaan, pengeluaran dan keadaan kas berdasarkan penerimaan dan pengeluaran sebagai bahan pertanggungjawaban
8. Melaksanakan tugas dan perintah dari pimpinan / atasan

B. Struktur Jabatan

Struktur organisasi jabatan "Pengadministrasi Perkantoran", sebagaimana gambar 1.1 dibawah ini :

Gambar 1.1 Struktur Organisasi



BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Adapun perjanjian kinerja "Pengadministrasi Perkantoran" Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Pengadministrasi Perkantoran
Tahun 2025

No	Uraian Tugas	Indikator Kinerja	Target
1	Mengelola uang / surat berharga sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk bahan pertanggungjawaban	Jumlah surat berharga yang tersusun	360 dokumen / berkas
2	Menyusun pengajuan surat permintaan pembayaran ke BPKAD berdasarkan surat perintah untuk mengurus keuangan	Jumlah pengajuan surat permintaan pembayaran yang tersusun	360 dokumen / berkas
3	Menyusun surat perintah membayar (SPM) berdasarkan prosedur yang berlaku untuk penerimaan uang	Jumlah surat perintah membayar (SPM) yang tersusun	60 dokumen / berkas
4	Melaksanakan pembayaran atas tagihan-tagihan berdasarkan surat dinas untuk kelancaran pelaksanaan tugas	Jumlah pembayaran tagihan yang terlaksana	48 kegiatan

5	Melaksanakan permintaan uang muka berdasarkan surat perintah untuk kelancaran pelaksanaan tugas	Jumlah permintaan uang muka yang terpenuhi	1 kegiatan
6	Menyusun pencatatan penerimaan dan pengeluaran uang di dalam formulir daftar penerimaan dan pengeluaran yang telah ditetapkan sesuai prosedur yang berlaku untuk bahan lampiran laporan	Jumlah pencatatan penerimaan dan pengeluaran uang yang tersusun	120 dokumen / berkas
7	Menyusun laporan mengenai permintaan, pengeluaran dan keadaan kas berdasarkan penerimaan dan pengeluaran sebagai bahan pertanggungjawaban	Jumlah laporan keuangan yang tersusun	72 dokumen / berkas
8	Melaksanakan tugas dan perintah dari pimpinan / atasan	Jumlah pelaksanaan tugas sesuai perintah	50 berkas / dokumen / kegiatan

B. Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja "Pengadministrasi Perkantoran" Triwulan II Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi indikator kinerja kegiatan.

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Target}}{\text{Realisasi}} \times 100\%$$

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran sesuai Permendagri No. 54 Tahun 2010, menggunakan interpretasi penilaian dengan pengukuran dengan skala ordinal yaitu:

Tabel 2.2

Pengukuran dengan Skala Ordinal

Skala Ordinal	Predikat / Kategori
90.1 s.d. lebih	Sangat Tinggi / Sangat Berhasil
75.1 s.d. 90	Tinggi / Berhasil
65.1 s.d. 75	Sedang / Cukup Berhasil
50.1 s.d. 65	Rendah / Tidak Berhasil
0 s.d. 50	Sangat Rendah / Sangat Tidak Berhasil

Adapun capaian kinerja "Pengadministrasi Perkantoran" Triwulan II Tahun 2025 sebagaimana tabel 2.3 dibawah ini :

Tabel 2.3

Pengukuran Kinerja "Pengadministrasi Perkantoran" Triwulan II Tahun 2025

No	Uraian Tugas	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target sd Triwulan II	Realisasi sd Triwulan II	% Capaian
1	Mengelola uang / surat berharga sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk bahan pertanggungjawaban	Jumlah surat berharga yang tersusun	360 dokumen / berkas	180	180	100
2	Menyusun pengajuan surat permintaan pembayaran ke BPKAD berdasarkan surat perintah untuk mengurus keuangan	Jumlah pengajuan surat permintaan pembayaran yang tersusun	360 dokumen / berkas	180	180	100
3	Menyusun surat perintah membayar (SPM) berdasarkan prosedur yang berlaku untuk penerimaan uang	Jumlah surat perintah membayar (SPM) yang tersusun	60 dokumen / berkas	30	30	100
4	Melaksanakan pembayaran atas tagihan-tagihan berdasarkan surat dinas untuk kelancaran	Jumlah pembayaran tagihan yang terlaksana	48 kegiatan	24	24	100

No	Uraian Tugas	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target sd Triwulan II	Realisasi sd Triwulan II	% Capaian
	pelaksanaan tugas					
5	Melaksanakan permintaan uang muka berdasarkan surat perintah untuk kelancaran pelaksanaan tugas	Jumlah permintaan uang muka yang terpenuhi	1 kegiatan	0	0	100
6	Menyusun pencatatan penerimaan dan pengeluaran uang di dalam formulir daftar penerimaan dan pengeluaran yang telah ditetapkan sesuai prosedur yang berlaku untuk bahan lampiran laporan	Jumlah pencatatan penerimaan dan pengeluaran uang yang tersusun	120 dokumen / berkas	60	60	100
7	Menyusun laporan mengenai permintaan, pengeluaran dan keadaan kas berdasarkan penerimaan dan pengeluaran sebagai bahan pertanggungjawaban	Jumlah laporan keuangan yang tersusun	72 dokumen / berkas	36	36	100
8	Melaksanakan tugas dan perintah dari pimpinan / atasan	Jumlah pelaksanaan tugas sesuai perintah	50 berkas / dokumen / kegiatan	25	25	100
Rata-rata Capaian						100%

Dari tabel 2.3 di atas rata-rata pencapaian kinerja Pengadministrasi Keuangan pada Sub. Bagian Program Anggaran dan Keuangan Badan Kesbangpol Kota Pekalongan adalah sebesar 100% dengan kategori Sangat Tinggi/Sangat Berhasil, faktor pendukung keberhasilannya sebagai berikut :

1. Adanya Perwal tentang tugas pokok dan fungsi (Perwal Nomor 82 Tahun 2020) dan SOP Pengadministrasi Keuangan sebagai pedoman;
2. Monitoring dan Evaluasi pimpinan secara rutin tiap minggu;
3. Sarana dan prasarana yang memadai.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran kegiatan diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian kinerja "Pengadministrasi Keuangan" adalah sebesar 100% dengan kategori "Sangat Tinggi/Sangat Berhasil".

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka yang dapat direkomendasikan untuk perbaikan perencanaan kinerja dalam "Pengadministrasi Keuangan" Triwulan II Tahun 2025 adalah sebagai berikut :


1. Penambahan penyediaan sarana dan prasarana penunjuang kinerja;
2. Peningkatan SDM secara kuantitatif dan kualitatif;
3. Peningkatan kedisiplinan dalam pelaksanaan kegiatan.

Pekalongan, 1 Juli 2025

Mengetahui

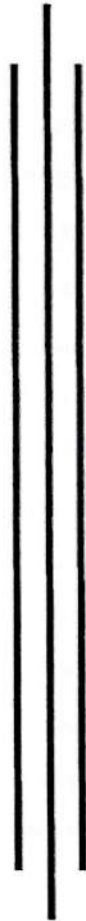
Kasubag. Program Anggaran dan Keuangan
Badan Kesbangpol Kota Pekalongan

PENGADMINISTRASI PERKANTORAN


IMAN WIDIHARJO, A.Md
NIP. 19810909 200604 1 005


Muhamad Bilfi
NIP. 19790724 2008701 1 003

LAPORAN KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2025
PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA



BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA PEKALONGAN
TAHUN 2025

Laporan Kinerja Triwulan II Pranata Komputer Ahli Pertama |
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekalongan, 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia Nya maka Laporan Kinerja (LKJ) Pranata Komputer Ahli Pertama pada Sekretariat Bagian Umum dan Kepegawaian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekalongan Triwulan II Tahun 2025 dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan Kinerja (LKJ) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat umumnya dan Aparatur Sipil Negara (ASN) khususnya bahwa Pranata Komputer Ahli Pertama pada Sekretariat Bagian Umum dan Kepegawaian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekalongan mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa *output* maupun *outcomes*.

Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan capaian kinerja secara berkala dalam pelaksanaan tugas pokok fungsi dan kewenangan di dalam pengelolaan manajemen kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja. Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja) Pranata Komputer Ahli Pertama pada Sekretariat Bagian Umum dan Kepegawaian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekalongan melalui pelaksanaan tugas dengan mendasarkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang telah ditetapkan.

Pekalongan, 1 Juli 2025

PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA



MUHAMAD BIYAL, S.Kom

NIPPPK. 19880221 202521 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A Tugas Jabatan	1
B Struktur Jabatan	1
BAB II AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN	2
A Perjanjian Kinerja	2
B Capaian Kinerja	2
BAB III PENUTUP	5
A Kesimpulan	5
B Rekomendasi	5

BAB I

PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

Pranata Komputer Ahli Pertama uraian tugas jabatan adalah sebagai berikut:

1. Deteksi dan atau perbaikan terhadap permasalahan infrastruktur teknologi informasi;
2. Pemanfaatan sistem informasi maupun aplikasi Pemerintah baik dari Pemerintah pusat maupun Pemerintah Daerah;
3. Melakukan audit rutin terhadap perangkat keras (*hardware*) maupun perangkat lunak (*software*) guna kelancaran dalam melaksanakan tugas;
4. Pemanfaatan otomatisasi perkantoran guna efisiensi waktu dan kinerja.

B. Struktur Jabatan

Struktur organisasi jabatan Pranata Komputer Ahli Pertama, sebagaimana gambar 1.1 dibawah ini :

Gambar 1.1 Struktur Organisasi



BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA

JABATAN

A. Perjanjian Kinerja

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Pranata Komputer Ahli Pertama Tahun 2025

NO	URAIAN TUGAS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terlaksananya pelayanan administrasi kepegawaian dengan cepat sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku	Jumlah laporan administrasi kepegawaian sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku	12 berkas
2	Terlaksananya pengelolaan dan pemeliharaan infrastruktur IT, website, media sosial dan aplikasi lain untuk mendukung kelancaran proses administrasi umum perangkat daerah	Jumlah laporan pengelolaan dan pemeliharaan infrastruktur IT, website, media sosial dan aplikasi lain	6 Berkas
3	Terlaksananya administrasi pengelolaan rumah tangga dinas (inventaris/persediaan) secara berkala sesuai dengan prosedur yang berlaku	Jumlah laporan administrasi pengelolaan rumah tangga dinas (inventaris/persediaan)	4 laporan
4	Terlaksananya pengelolaan jaringan komputer dan sistem pendukung layanan urusan pemerintah daerah	Jumlah laporan pengelolaan jaringan komputer dan sistem pendukung	12 berkas
5	Terlaksananya tugas lain dan arahan dari pimpinan	Terlaksananya tugas lain dan arahan dari pimpinan	12 Bulan

B. Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja Pranata Komputer Ahli Pertama Triwulan II Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi indikator kinerja kegiatan.

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Target}}{\text{Realisasi}} \times 100\%$$

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran sesuai Permendagri No. 54 Tahun 2010, menggunakan interpretasi penilaian dengan pengukuran dengan skala ordinal yaitu:

Tabel 2.2

Pengukuran dengan Skala Ordinal

Skala Ordinal	Predikat / Kategori
90.1 s.d. lebih	Sangat Tinggi / Sangat Berhasil
75.1 s.d. 90	Tinggi / Berhasil
65.1 s.d. 75	Sedang / Cukup Berhasil
50.1 s.d. 65	Rendah / Tidak Berhasil
0 s.d. 50	Sangat Rendah / Sangat Tidak Berhasil

Adapun capaian kinerja Pranata Komputer Ahli Pertama Triwulan II Tahun 2025 sebagaimana tabel 2.3 dibawah ini :

Tabel 2.3

Pengukuran Kinerja Pranata Komputer Ahli Pertama Triwulan II Tahun 2025

NO	URAIAN TUGAS	INDIKATOR KINERJA	Target Tahunan	Target s.d. Triwulan II	Realisasi s.d. Triwulan II	% Capaian
1	2	3	4			
1	Terlaksananya pelayanan administrasi kepegawaian dengan cepat sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku	Jumlah laporan administrasi kepegawaian sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku	12 berkas	6 Berkas	6 Berkas	100
2	Terlaksananya pengelolaan dan pemeliharaan infrastruktur IT, website, media sosial dan aplikasi lain untuk mendukung kelancaran proses administrasi umum perangkat daerah	Jumlah laporan pengelolaan dan pemeliharaan infrastruktur IT, website, media sosial dan aplikasi lain	6 Berkas	3 Berkas	3 Berkas	100
3	Terlaksananya administrasi pengelolaan rumah tangga dinas (inventaris/persediaan) secara berkala sesuai dengan prosedur yang berlaku	Jumlah laporan administrasi pengelolaan rumah tangga dinas (inventaris/persediaan)	4 laporan	2 Laporan	2 Laporan	100
4	Terlaksananya pengelolaan jaringan komputer dan sistem pendukung layanan urusan pemerintah daerah	Jumlah laporan pengelolaan jaringan komputer dan sistem pendukung	12 Berkas	6 Berkas	6 Berkas	100
5	Terlaksananya tugas lain dan arahan dari pimpinan	Terlaksananya tugas lain dan arahan dari pimpinan	12 Bulan	6 Bulan	6 Bulan	100

Faktor Penghambat capaian kinerja pada Triwulan I ini adalah sebagai berikut :

1. Keterbatasan alat pendukung Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk kelancaran dalam pekerjaan sehari hari;
2. Keterbatasan Jaringan Komputer sebagai jembatan utama dalam komunikasi Teknologi Informasi;
3. Keterbatasan IT Support dalam hal ini Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai pendukung dalam hal Persiapan, Pelaksanaan dan Deteksi Masalah pada Teknologi Informasi;

Upaya yang dilakukan guna mendukung capaian kinerja pada Triwulan selanjutnya adalah sebagai berikut :

1. Pengadaan alat pendukung TIK pada Anggaran Perubahan;
2. Pengadaan peralatan jaringan komputer untuk meningkatkan koneksi wifi;
3. Pelatihan sederhana kepada pegawai untuk mempermudah dan efisiensi pekerjaan.

BAB III

PENUTUP

Berdasarkan hasil pengukuran kegiatan diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian kinerja Pranata Komputer Ahli Pertama adalah sebesar 100% dengan kategori "Sangat Tinggi"

Pekalongan, 1 Juli 2025

Mengetahui

Kepala Subbag Umum & Kepegawaian
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
Kota Pekalongan



SOPAN WIJANTO, S.E., M.Si.
NIP. 19830504 201001 1 013

Pranata Komputer
Ahli Pertama



MUHAMAD BIYAL, S.Kom
NIPPPK. 19880221 202521 1 001

LAPORAN KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2025
ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA



BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PEKALONGAN
TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia Nya maka Laporan Kinerja (LKj) "Analisis Kebijakan Ahli Pertama" Triwulan II Tahun 2025 dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat umumnya dan Pegawai Negeri Sipil pada khususnya bahwa "Analisis Kebijakan Ahli Pertama" mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa *output* maupun *outcomes*.

Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan capaian kinerja secara berkala dalam pelaksanaan tugas pokok fungsi dan kewenangan di dalam pengelolaan manajemen kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja. Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja "Analisis Kebijakan Ahli Pertama" melalui pelaksanaan tugas dengan mendasarkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang telah ditetapkan.

Pekalongan, 1 Juli 2025

Analisis Kebijakan Ahli Pertama



Muhammad Sholahuddin, S.H.

Penata Muda

NIP. 20010804 202504 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A Tugas Jabatan	1
B Struktur Jabatan	2
BAB II AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN	2
A Perjanjian Kinerja	3
B Capaian Kinerja	2
BAB III PENUTUP	5
A Kesimpulan	5
B Rekomendasi	5

BAB I

PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 59B Tahun 2021 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Pegawai Negeri Sipil pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekalongan, "Analisis Kebijakan Ahli Pertama" mempunyai uraian tugas jabatan adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
2. Jumlah dokumen terkait perumusan masalah kebijakan
3. Jumlah laporan rekomendasi kebijakan
4. Jumlah dokumen rumusan masalah kebijakan
5. Tersedianya Laporan hasil evaluasi
6. Jumlah laporan kinerja yang sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

B. Struktur Jabatan

Struktur organisasi jabatan "Analis Kebijakan Ahli Pertama", sebagaimana gambar 1.1 dibawah ini :

Gambar 1.1 Struktur Organisasi



BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Adapun perjanjian kinerja "Analisis Kebijakan Ahli Pertama" Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Analisis Kebijakan Ahli Pertama
Tahun 2025

No	Uraian Tugas	Indikator Kinerja	Target
1.	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	200 Orang
2.	Menyediakan informasi terkait perumusan masalah	Jumlah dokumen terkait perumusan masalah kebijakan	1 dokumen
3.	Menyediakan rekomendasi kebijakan	Jumlah laporan rekomendasi kebijakan	1 dokumen
4.	Merumuskan isue-isue kebijakan ke dalam rumusan masalah	Jumlah dokumen rumusan masalah kebijakan	1 dokumen
5.	Melaksanakan pemantauan dan evaluasi implementasi kebijakan	Tersedianya Laporan hasil evaluasi	1 dokumen
6.	Membuat laporan kinerja secara berkala, sesuai dengan prosedur dan	Jumlah laporan kinerja yang sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku	1 Laporan

No	Uraian Tugas	Indikator Kinerja	Target
	ketentuan yang berlaku sebagai bahan penyusunan program berikutnya		

B. Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja "Analisis Kebijakan Ahli Pertama" Triwulan II Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi indikator kinerja kegiatan.

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Target}}{\text{Realisasi}} \times 100\%$$

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran sesuai Permendagri No. 54 Tahun 2010, menggunakan interpretasi penilaian dengan pengukuran dengan skala ordinal yaitu:

Tabel 2.2

Pengukuran dengan Skala Ordinal

Skala Ordinal	Predikat / Kategori
90.1 s.d. lebih	Sangat Tinggi / Sangat Berhasil
75.1 s.d. 90	Tinggi / Berhasil
65.1 s.d. 75	Sedang / Cukup Berhasil
50.1 s.d. 65	Rendah / Tidak Berhasil
0 s.d. 50	Sangat Rendah / Sangat Tidak Berhasil

Adapun capaian kinerja "Analisis Kebijakan Ahli Pertama" Triwulan II Tahun 2025 sebagaimana tabel 2.3 dibawah ini :

Tabel 2.3
Pengukuran Kinerja "Analisis Kebijakan Ahli Pertama"
Triwulan II Tahun 2025

No	Uraian Tugas	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target Triwulan II	Realisasi Triwulan II	% Capaian
1	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	200 Orang	100 Orang	100 Orang	100%
2	Menyediakan informasi terkait perumusan masalah	Jumlah dokumen terkait perumusan masalah kebijakan	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%
3	Menyediakan rekomendasi kebijakan	Jumlah laporan rekomendasi kebijakan	1 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	100%
4	Merumuskan issue-issue kebijakan ke dalam rumusan masalah	Jumlah dokumen rumusan masalah kebijakan	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%
5	Melaksanakan pemantauan dan evaluasi implementasi kebijakan	Tersedianya Laporan hasil evaluasi	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%
6	Membuat laporan kinerja secara berkala, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang	Jumlah laporan kinerja yang sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%

No	Uraian Tugas	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target Triwulan II	Realisasi Triwulan II	% Capaian
	berlaku sebagai bahan penyusunan program berikutnya	berlaku				
Rata-rata Capaian						100%

Dari tabel 2.3 di atas rata-rata pencapaian kinerja Analisis Kebijakan Ahli Pertama pada Bidang Kesatuan Bangsa Badan Kesbangpol Kota Pekalongan adalah sebesar 100% dengan kategori Sangat Tinggi/Sangat Berhasil, faktor pendukung keberhasilannya sebagai berikut :

1. Adanya Perwal tentang tugas pokok dan fungsi (Perwal Nomor 82 Tahun 2020)
2. Monitoring dan Evaluasi pimpinan secara rutin tiap minggu;

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran kegiatan diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian kinerja "Analisis Kebijakan" adalah sebesar 100% dengan kategori "Sangat Tinggi/Sangat Berhasil".

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka yang dapat direkomendasikan untuk perbaikan perencanaan kinerja dalam "Analisis Kebijakan Ahli Pertama" Triwulan II Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Penambahan penyediaan sarana dan prasarana penunjuang kinerja;
2. Peningkatan SDM secara kuantitatif dan kualitatif;
3. Peningkatan kedisiplinan dalam pelaksanaan kegiatan.

Pekalongan, 1 Juli 2025

Mengetahui
KEPALA BIDANG POLITIK DALAM NEGERI
DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN,



NUGROHO ADHI PRADHANA, S.E., M.Si
NIP. 197408051999031005

ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA,



MUHAMMAD SHOLAHUDDIN, S.H.
NIP. 200108042025041001

LAPORAN KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2025
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN



BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KOTA PEKALONGAN

TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia Nya maka Laporan Kinerja (LKJ) Pengadministrasi Perkantoran pada Bidang Kesatuan Bangsa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekalongan Triwulan II Tahun 2025 dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat umumnya dan Aparatur Sipil Negara (ASN) khususnya bahwa Pengadministrasi Perkantoran pada Bidang Kesatuan Bangsa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekalongan mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa *output* maupun *outcomes*.

Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan capaian kinerja secara berkala dalam pelaksanaan tugas pokok fungsi dan kewenangan di dalam pengelolaan manajemen kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja. Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja) Pengadministrasi Perkantoran pada Bidang Kesatuan Bangsa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekalongan melalui pelaksanaan tugas dengan mendasarkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang telah ditetapkan.

Pekalongan, 01 Juli 2025

PENGADMINISTRASI PERKANTORAN


MUSTAKIM

NIP. 19680212 200906 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A Tugas Jabatan	1
B Struktur Jabatan	1
BAB II AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN	2
A Perjanjian Kinerja	2
B Capaian Kinerja	3
BAB III PENUTUP	6
A Kesimpulan	6
B Rekomendasi	6

BAB I

PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

Pengadministrasian Perkantoran uraian tugas jabatan adalah sebagai berikut:

1. Terlaksananya penerimaan, pencatatan dan penyurtiran surat/dokumen/berkas sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar memudahkan pencarian;
2. Terlaksananya pemberian lembar pengantar pada surat/dokumen/berkas, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar memudahkan pengendalian;
3. Terlaksananya pengelompokan surat/dokumen/ berkas menurut jenis dan sifatnya, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar memudahkan pendistribusian;
4. Terlaksananya administrasi dan dokumentasi surat/dokumen/berkas sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar tertib administrasi.
5. Terlaporkannya hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban
6. Melaksanakan tugas dan perintah dari pimpinan/atasan

B. Struktur Jabatan

Struktur organisasi jabatan Pengadministrasian Kepegawaian, sebagaimana gambar 1.1 dibawah ini :

Gambar 1.1 Struktur Organisasi



BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA

JABATAN

A. Perjanjian Kinerja

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Pengadministrasi Kepegawaian Tahun 2025

NO	URAIAN TUGAS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terlaksananya penerimaan, pencatatan dan penyurtiran surat/dokumen/berkas sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar memudahkan pencarian	Jumlah surat/dokumen/berkas yang tersusun	8 Berkas
2	Terlaksananya pemberian lembar pengantar pada surat/dokumen/berkas, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar memudahkan pengendalian	Jumlah pemberian lembar pengantar pada surat/dokumen/berkas sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar memudahkan pengendalian	30 Berkas
3	Terlaksananya pengelompokan surat/dokumen/berkas menurut jenis dan sifatnya, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar memudahkan pendistribusian	Jumlah pengelompokan surat/dokumen/berkas yang disusun	25 Berkas
4	Terlaksananya administrasi dan dokumentasi surat/dokumen/berkas sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar tertib administrasi	Jumlah administrasi dan dokumentasi surat/dokumen/berkas	30 Berkas
5	Terlaporkannya hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban	Jumlah laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban	30 Laporan

NO	URAIAN TUGAS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
6	Melaksanakan tugas dan perintah dari pimpinan/atasan	Jumlah pelaksanaan tugas dan perintah dari pimpinan/atasan	15 Laporan

B. Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja Pengadministrasi Perkantoran Triwulan II Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi indikator kinerja kegiatan.

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Target}}{\text{Realisasi}} \times 100\%$$

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran sesuai Permendagri No. 54 Tahun 2010, menggunakan interpretasi penilaian dengan pengukuran dengan skala ordinal yaitu:

Tabel 2.2

Pengukuran dengan Skala Ordinal

Skala Ordinal	Predikat / Kategori
90.1 s.d. lebih	Sangat Tinggi / Sangat Berhasil
75.1 s.d. 90	Tinggi / Berhasil

Skala Ordinal	Predikat / Kategori
65.1 s.d. 75	Sedang / Cukup Berhasil
50.1 s.d. 65	Rendah / Tidak Berhasil
0 s.d. 50	Sangat Rendah / Sangat Tidak Berhasil

Adapun capaian kinerja Pengadministrasi Kepegawaian Triwulan II Tahun 2025 sebagaimana tabel 2.3 dibawah ini :

Tabel 2.3
Pengukuran Kinerja Pengadministrasi Kepegawaian Triwulan II Tahun 2025

NO	URAIAN TUGAS	INDIKATOR KINERJA	Target Tahunan	Target s.d. Triwulan II	Realisasi s.d. Triwulan II	% Capaian
1	2	3	4			
1	Terlaksananya penerimaan, pencatatan dan penyurtiran surat/dokumen/berkas sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar memudahkan pencarian	Jumlah surat/dokumen/berkas yang tersusun	8 Berkas	4 Berkas	4 Berkas	100
2	Terlaksananya pemberian lembar pengantar pada surat/dokumen/berkas, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar memudahkan pengendalian	Jumlah pemberian lembar pengantar pada surat/dokumen/berkas sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar memudahkan pengendalian	30 Berkas	16 Berkas	16 Berkas	100
3	Terlaksananya pengelompokan surat/dokumen/berkas menurut jenis dan sifatnya, sesuai dengan	Jumlah pengelompokan surat/dokumen/berkas yang disusun	25 Berkas	12 Berkas	12 Berkas	100

NO	URAIAN TUGAS	INDIKATOR KINERJA	Target Tahunan	Target s.d. Triwulan II	Realisasi s.d. Triwulan II	% Capaian
1	2	3	4			
	prosedur dan ketentuan yang berlaku agar memudahkan pendistribusian					
4	Terlaksananya administrasi dan dokumentasi surat/dokumen/berkas sesuai dengan prosedur dan	Jumlah administrasi dan dokumentasi surat/dokumen/berkas	30 Berkas	16 Berkas	16 Berkas	100
5	Terlaporkannya hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban	Jumlah laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban	30 Laporan	16 Laporan	16 Laporan	100
6	Melaksanakan tugas dan perintah dari pimpinan/atasan	Jumlah pelaksanaan tugas dan perintah dari pimpinan/atasan	15 Laporan	8 Laporan	8 Laporan	100

Faktor Penghambat capaian kinerja pada Triwulan II ini adalah sebagai berikut :

1. Keterbatasan Jaringan Internet sebagai jembatan utama dalam komunikasi untuk kelancaran dalam pekerjaan sehari-hari;
2. Penambahan penyediaan sarana dan prasarana penunjang kinerja;
3. Peningkatan kedisiplinan dalam pelaksanaan kegiatan;

Upaya yang dilakukan guna mendukung capaian kinerja pada Triwulan selanjutnya adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kedisiplinan dalam kinerja;
2. Pengadaan peralatan jaringan komputer untuk meningkatkan koneksi wifi;
3. Pelatihan sederhana kepada pegawai untuk mempermudah dan efisiensi pekerjaan.

BAB III PENUTUP


Berdasarkan hasil pengukuran kegiatan diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian kinerja Pengadministrasi Perkantoran adalah sebesar 100% dengan kategori "Sangat Tinggi / Sangat Berhasil"

Pekalongan, 01 Juli 2025

Mengetahui

Kepala Bidang Kesatuan Bangsa
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota
Pekalongan

Pengadministrasi Perkantoran


NUR SLAMET B. S.Pi. M.Si.
NIP. 19721201 199303 1 005


MUSTAKIM
NIP. 19680212 200906 1 003

**LAPORAN KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2025
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN**



**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA PEKALONGAN
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia Nya maka Laporan Kinerja (LKj) Pengadministrasi Perkantoran Triwulan 2 Tahun 2025 dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat umumnya dan Pegawai Negeri Sipil pada khususnya bahwa "Pengadministrasi Perkantoran" mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa *output* maupun *outcomes*.

Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan capaian kinerja secara berkala dalam pelaksanaan tugas pokok fungsi dan kewenangan di dalam pengelolaan manajemen kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja. Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja "Pengadministrasi Perkantoran" melalui pelaksanaan tugas dengan mendasarkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang telah ditetapkan.

Pekalongan, 1 Juli 2025

Pengadimistrasi Perkantoran



PUR ISTIMAWATI

Penata Muda

NIP. 19750411 200701 2010

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A Tugas Jabatan	1
B Struktur Jabatan	1
BAB II AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN	2
A Perjanjian Kinerja	2
B Capaian Kinerja	3
BAB III PENUTUP	5
A Kesimpulan	5
B Rekomendasi	5

BAB I

PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok

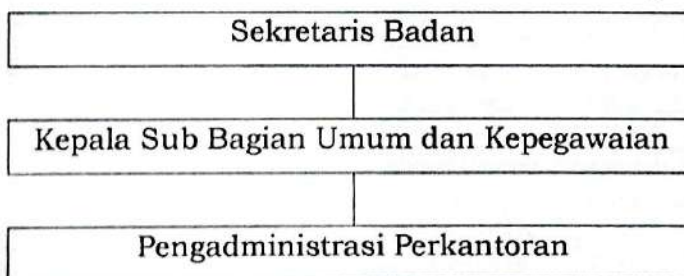
Berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 54C Tahun 2020 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Pegawai Negeri Sipil pada Badan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan, *Pengadministrasi Perkantoran* mempunyai uraian tugas jabatan adalah sebagai berikut :

1. Terlaksananya administratif kepegawalan sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku.
2. Terlaksananya pengelolaan rumah tangga dinas (Inventaris/Aset) sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku
3. Terlaksananya administrasi Umum sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang agar tertib administratif
4. Terlaksananya tugas dan perintah atasan.

B. Struktur Jabatan

Struktur organisasi jabatan Pengadministrasi Perkantoran, sebagaimana gambar 1.1 dibawah ini :

Gambar 1.1 Struktur Organisasi



BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Adapun perjanjian kinerja Pengadministrasi Perkantoran Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Pengadministrasi Perkantoran Tahun 2025

No	Uraian Tugas	Indikator Kinerja	Target
1	Terlaksananya administrasi kepegawaian sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku	Jumlah administrasi kepegawaian	5 Laporan
2	Terlaksananya administrasi kepegawaian sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku	Jumlah bulan pelaksanaan adminitrasi kepegawaian	12 Bulan
3	Terlaksananya pengelolaan rumah tangga dinas (Inventaris/Aset) sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku	Jumlah laporan pengelolaan rumah tangga dinas (Inventaris/Aset)	4 Laporan
4	Terlaksananya pengelolaan rumah tangga Dinas (Inventaris/Aset) sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku	Jumlah bulan pelaksanaan pengelolaan rumah tangga dinas (Inventaris/Aset)	12 Bulan
5	Terlaksananya administrasi Umum sesuai dengan prosedur dan ketentuan agar tertib administrasi	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi Umum	12 Bulan
6	Terlaksananya tugas dan perintah atasan	Jumlah bulan pelaksanaan tugas dan perintah atasan	12 Bulan

B. Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja Pengadministrasi Perkantoran Triwulan II Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi indikator kinerja keglatan.

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Target}}{\text{Realisasi}} \times 100\%$$

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran sesuai Permendagri No. 54 Tahun 2010, menggunakan interpretasi penilaian dengan pengukuran dengan skala ordinal yaitu:

Tabel 2.2

Pengukuran dengan Skala Ordinal

Skala Ordinal	Predikat / Kategori
90.1 s.d. lebih	Sangat Tinggi / Sangat Berhasil
75.1 s.d. 90	Tinggi / Berhasil
65.1 s.d. 75	Sedang / Cukup Berhasil
50.1 s.d. 65	Rendah / Tidak Berhasil
0 s.d. 50	Sangat Rendah / Sangat Tidak Berhasil

Adapun capaian kinerja Pengadministrasi Perkantoran Triwulan II Tahun 2025 sebagaimana tabel 2.3 dibawah ini :

Tabel 2.3

Pengukuran Kinerja Pengadministrasi Perkantoran Triwulan II Tahun 2025

No	Uraian Tugas	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target s.d. Triwulan II	Realisasi s.d. Triwulan II	% Capaian
1	Terlaksananya administrasi kepegawaian sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku	Jumlah laporan administrasi kepegawaian	5	5	5	100%
2	Terlaksananya administrasi kepegawaian sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi kepegawaian	12	6	6	100%
3	Terlaksananya pengelolaan rumah tangga Dinas (Inventaris/Aset) sesuai aturan yang berlaku	Jumlah Laporan pengelolaan rumah tangga Dinas	4	2	2	100%
4	Terlaksananya pengelolaan rumah tangga Dinas (Inventaris/Aset) sesuai aturan yang berlaku	Jumlah bulan pengelolaan rumah tangga Dinas/ Aset	12	6	6	100%
5	Terlaksananya administrasi Umum sesuai dengan prosedur dan ketentuan agar tertib administrasi	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi Umum	12	6	6	100%
6	Terlaksananya tugas dan perintah atasan	Jumlah bulan pelaksanaan tugas dan perintah atasan	12	6	6	100%

Faktor Pendukung keberhasilan capaian kinerja pada Triwulan I ini adalah sebagai berikut :

1. Arahan dan bimbingan dari atasan langsung.
2. Terpenuhinya sarana dan prasarana kerja.

Faktor Penghambat capaian kinerja pada Triwulan I ini adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya sarana dan prasarana (Lap top sudah lemot)
2. Kurang kuat koneksi Internet (Lemot koneksi internet)

Upaya yang dilakukan guna mendukung capaian kinerja pada Triwulan selanjutnya adalah sebagai berikut :

1. Usulan pengadaan sarana dan prasarana.

BAB III

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran kegiatan diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian kinerja Pengadministrasi Perkantoran adalah sebesar 100% dengan kategori Sangat Baik

Pekalongan, 1 Juli 2025

Mengetahui

KEPALA SUB. BAGIAN UMUM DAN
KEPEGAWAIAN



SOPAN WIJANTO. SE.M.SI
NIP. 19830504 201001 1 013

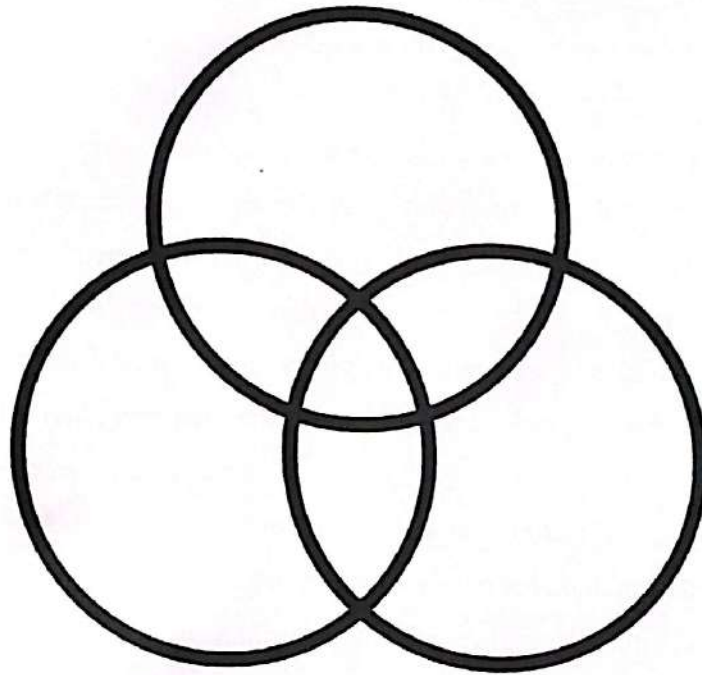
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN



PUR ISTIMAWATI
NIP. 19750411 200701 2 010

LAPORAN KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2025

PENGADMINISTRASI PERKANTORAN



Oleh:

URIP WIDIYANTO

NIP: 19740318 201212 1 002

**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA PEKALONGAN
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya, Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2025 Pengadministrasi Perkantoran pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Pekalongan ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.


Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi administrasi perkantoran selama periode April hingga Juni 2025. Dalam laporan ini termuat informasi mengenai capaian kinerja, pelaksanaan kegiatan, serta hambatan dan upaya perbaikan yang dilakukan dalam rangka mendukung tercapainya tujuan organisasi secara efektif dan efisien.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan masukan, kritik, dan saran dari berbagai pihak guna penyempurnaan laporan dan peningkatan kinerja pada periode-periode berikutnya.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam pelaksanaan tugas-tugas administrasi perkantoran di lingkungan Badan Kesbangpol Kota Pekalongan. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat serta menjadi bahan evaluasi dan perencanaan yang lebih baik di masa mendatang.

Pekalongan, 04 Juli 2025

Pengadministrasi Perkantoran


URIP WIDIYANTO

Pengatur Tingkat I

NIP. 19740318 201212 002

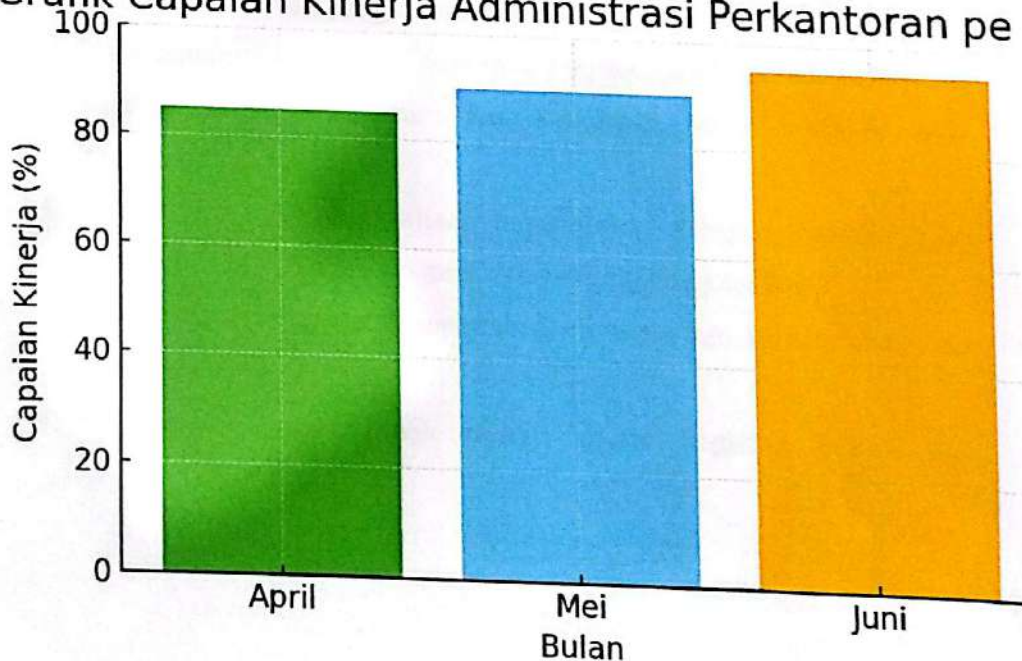
DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A Tugas Jabatan	1
B Struktur Jabatan	2
BAB II AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN	3
A Perjanjian Kinerja	3
B Capaian Kinerja	4
BAB III PENUTUP	7
A Kesimpulan	7
B Rekomendasi	7

Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Perkantoran April–Juni 2025

No	Uraian Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Realisasi Kegiatan	Keterangan
1	Pengelolaan surat masuk dan keluar	April – Juni 2025	100% surat tercatat dan tersip	Terlaksana sesuai rencana
2	Penyusunan dokumen administrasi Ormas	April – Juni 2025	Laporan tersedia Sesuai Regulasi	Tepat waktu
3	Verifikasi Faktual dan Tinjauan Lapangan	April – Juni 2025	Data Ter Up Date dan Validitas	Terlaksana
4	Rekap Daftar Ormas dan laporan Bulanan	Akhir April, Mei, Juni	Data tersedia dan dilaporkan	Tepat waktu
5	Pendukung kegiatan internal kelembagaan	Mei dan Juni 2025	Dokumentasi dan notulensi tersedia	Terlaksana

Grafik Capaian Kinerja Administrasi Perkantoran pe



BAB I

PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok

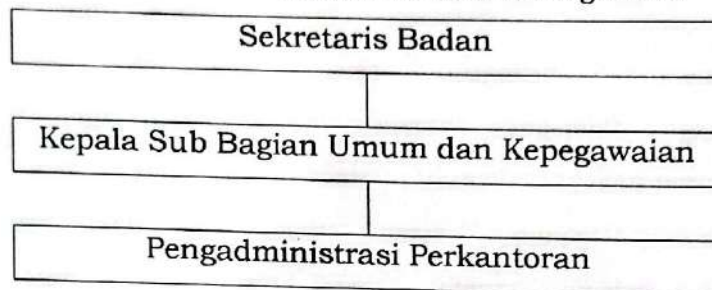
Berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 54c Tahun 2020 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Pegawai Negeri Sipil pada Badan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan, *Pengadministrasi Perkantoran* mempunyai uraian tugas jabatan adalah sebagai berikut:

1. Terlaksananya Administrasi surat / dokumen / berkas Ormas, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan pencarian sesuai aturan yang berlaku.
2. Terlaksananya Memberi lembar Chek List pada surat / dokumen / berkas Ormas, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan pengendalian.
3. Terlaksananya Verifikasi / dokumen / berkas dan Keberadaan Ormas, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan pendataan
4. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban
5. Melaksanakan tugas dan perintah serta tugas lain serta arahan dari pimpinan
6. Koordinasi dengan pihak terkait dalam kegiatan politik dan pembinaan Ormas

B. Struktur Jabatan

Struktur organisasi jabatan Pengadministrasi Perkantoran, sebagaimana gambar 1.1 dibawah ini :

Gambar 1.1 Struktur Organisasi



BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Adapun perjanjian kinerja Pengadministrasi Perkantoran Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Pengadministrasi Kantor Tahun 2025

No	Uraian Tugas	Indikator Kinerja	Target
1	Menerima dan mengadministrasi surat / dokumen / berkas Ormas, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan pencarian	Menyusun surat/dokumen Tertata Rapi sesuai SOP	100% surat dan arsip terkelola
2	Memberi lembar Chek List pada surat / dokumen / berkas Ormas, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan pengendalian	Laporan tersusun tepat waktu dan sesuai format	100% laporan selesai sesuai jadwal
3	Melakukan Verifikasi / dokumen / berkas dan Keberadaan Ormas, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan pendataan	Penyusunan dokumen perizinan dan rekomendasi organisasi kemasyarakatan	100% data Ormas yang terdaftar diperbarui
4	Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan	Koordinasi kegiatan internal dan eksternal Agenda Kesbangpol	Minimal 90% kegiatan terlaksana sesuai jadwal

No	Uraian Tugas	Indikator Kinerja	Target
	pertanggungjawaban	berjalan sesuai jadwal	
5	Melaksanakan tugas dan perintah atasan atau pimpinan	Penyusunan laporan administrasi Pelayanan administrasi perizinan dan rekomendasi Ormas	100% surat dikirim sesuai permintaan
6	Koordinasi dengan pihak terkait dalam kegiatan politik dan pembinaan Ormas	Penyusunan laporan kegiatan politik dalam negeri dan Ormas	100% kegiatan koordinasi terjadwal terlaksana sesuai rencana

B. Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja Pengadministrasi Perkantoran Triwulan II Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi indikator kinerja kegiatan.

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Target}}{\text{Realisasi}} \times 100\%$$

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran sesuai Permendagri No. 54 Tahun 2010, menggunakan interpretasi penilaian dengan pengukuran dengan skala ordinal yaitu:

Tabel 2.2

Pengukuran dengan Skala Ordinal

Skala Ordinal	Predikat / Kategori
90.1 s.d. lebih	Sangat Tinggi / Sangat Berhasil
75.1 s.d. 90	Tinggi / Berhasil
65.1 s.d. 75	Sedang / Cukup Berhasil
50.1 s.d. 65	Rendah / Tidak Berhasil
0 s.d. 50	Sangat Rendah / Sangat Tidak Berhasil

Adapun capaian kinerja Pengadministrasi Perkantoran Triwulan II Tahun 2025 sebagaimana tabel 2.3 dibawah ini :

Tabel 2.3

Pengukuran Kinerja Pengadministrasi Perkantoran Triwulan II Tahun 2025

No	Uraian Tugas	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target s.d Triwulan II	Realisasi s.d Triwulan II	% Capaian
1	Menerima dan mengadministrasi surat / dokumen / berkas Ormas, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan pencarian	Menyusun surat/dokumen Tertata Rapi sesuai SOP	100% surat dan arsip terkelola	48	48	100%
2	Memberi lembar Chek List pada surat / dokumen / berkas Ormas, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan pengendalian	Laporan tersusun tepat waktu dan sesuai format	100% laporan selesai sesuai jadwal	24	24	100%
3	Melakukan Verifikasi / dokumen / berkas dan Keberadaan Ormas, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan	Penyusunan dokumen perizinan dan rekomendasi organisasi kemasyarakatan	100% data Ormas yang terdaftar diperbarui	90	90	100%

No	Uraian Tugas	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target s.d Triwulan II	Realisasi s.d Triwulan II	% Capaian
	pendataan					
4	Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban	Koordinasi kegiatan internal dan eksternal Agenda Kesbangpol berjalan sesuai jadwal	Minimal 90% kegiatan terlaksana sesuai jadwal	12	12	100%
5	Melaksanakan tugas dan perintah atasan atau pimpinan	Penyusunan laporan administrasi Pelayanan administrasi perizinan dan rekomendasi Ormas	100% surat dikirim sesuai permintaan	40	40	100%
6	Koordinasi dengan pihak terkait dalam kegiatan politik dan pembinaan Ormas	Penyusunan laporan kegiatan politik dalam negeri dan Ormas	100% kegiatan koordinasi terjadwal terlaksana sesuai rencana	24	24	100 %

Faktor Pendukung keberhasilan capaian kinerja pada Triwulan II ini adalah sebagai berikut :

1. Arahan dan bimbingan dari atasan langsung.
2. Adanya sarana dan prasarana kerja.

Faktor Penghambat capaian kinerja pada Triwulan II ini adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya Kualitas sarana dan prasarana Kerja (Laptop Perlu di Up Grade)
2. Lingkungan Tidak Mendukung (Jika Hujan Banjir)
3. Kurangnya Pendidikan Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi

Upaya yang dilakukan guna mendukung capaian kinerja pada Triwulan selanjutnya adalah sebagai berikut :

1. Pengadaan sarana dan prasarana Baru
2. Penataan Lingkungan Dan Rehabilitasi Gedung Kantor

BAB III PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran kegiatan diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian kinerja Pengadministrasi Perkantoran adalah sebesar 100% dengan kategori Sangat Baik.

Akuntabilitas kinerja jabatan adalah bentuk pertanggungjawaban seorang pegawai atas pelaksanaan tugas dan fungsi jabatannya, yang ditetapkan melalui perjanjian kinerja serta dievaluasi berdasarkan indikator yang terukur, terencana, dan terdokumentasi. Akuntabilitas ini mencerminkan keseriusan pegawai dalam menjalankan peran sesuai jabatan yang diemban serta menjadi dasar dalam penilaian kinerja secara obyektif dan transparan

Pekalongan, 04 Juli 2025

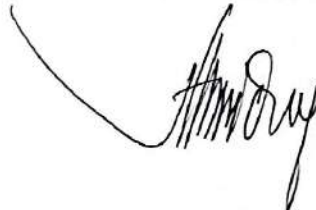
Mengetahui

KEPALA SUB. BAGIAN POLDAGRI DAN
ORMAS



NUGROHO ADHI PRADHANA, SE.M.Si
NIP. 19740805 199903 1 005

PENGADMINISTRASI PERKANTORAN



URIP WIDIYANTO
NIP. 19740318 201212 1 002